



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008-2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dipandang perlu mentapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam tahun 2008-2013

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukn kota Pagar Alam (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115)

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

6. Undang-undang nomor 12 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4700)
7. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
8. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
9. Peraturan Presiden nomor 8, tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
10. Peraturan daerah kota Pagar Alam nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kota Pagar Alam tahun 2005

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RJPM) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008-2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah kota Pagar Alam
2. Kota adalah kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Pemerintah kota adalah pemerintah kota Pagar Alam dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota Pagar Alam

5. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Daerah Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah kota Pagar Alam
6. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan daerah kota
7. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya Walikota periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
8. Rencana pembangunan jangka menengah dinas / badan / kantor dan unit kerja lingkup pemerintah kota Pagar Alam tahun 2008-2013, selanjutnya disebut rancangan strategis badan dinas / badan / kantor unit kerja, adalah dokumen perencanaan dinas / badan/ kantor unit kerja untuk periode 5 (lima) tahun selama masa jabatan kepala daerah tahun 2007-2013.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

RPJMD Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini dengan sistematika terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumentasi Perencanaan lainnya
- 1.5 Pola Pikir dan Proses Penyusunan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Perekonomian Daerah
- 2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Daerah

	2.4 Sosial Budaya Daerah
BAB III	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
	3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
	3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
	3.3 Kebijakan Pendapatan Daerah
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI DAN MISI
	5.1 Visi
	5.2 Misi
BAB VI	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	8.1 Program Lintas SKPD
	8.2 Program SKPD
BAB IX	INDIKATIR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB X	PENUTUP
	10.1 Program Transisi
	10.2 Kaidah Pelaksanaan
LAMPIRAN II	

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman kepala SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD bersifat indikatif

Pasal 5

Walikota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam rencana strategis SKPD oleh kepala SKPD

Pasal 6

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar :

- a. Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara oleh walikota; dan
- b. Penyusunan rencana SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD

Pasal 7

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD

Pasal 8

RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dana mengisi kekosongan RKPD tahun 2013 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 serta mengingat waktu yang sangat singkat bagi walikota terpilih hasil pemilihan umum tahun 2013 nanti untuk menyusun rancangan RPJMD tahun 2013-2018 serta RKPD tahun 2014, maka pemerintah daerah menyusun rancangan RKPD tahun 2014 sesuai jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2013 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2014.

Pasal 10

Hal-hal belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 10 Maret 2009
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. A. FACHRI, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 Nomor 6 Seri E

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
Nomor : 6 Tahun 2009
Tanggal : 10 Maret 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rencana pembanguna jangka menengah daerah (RPJMD) kota Pagar Alam tahun 2008-2013 telah diawali dengan proses teknokratik dan proses politik yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dan yang telah ditetapkan. Penyusunannya berpedoman undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, engan berbagai turunan peraturannya.

Pasal 14 ayat (2) UU nomor 25 tahun 2004 mengamanatkan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) untuk menyipakan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Rancangan awal tersebut selanjutnya dikaji ulang disesuaikan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kepentingannya adalah merumuskan strategi pembamngunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJMD merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan masa tugas kepala daerah terpilih. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertical maupun horizontal. Dari komponen vertical, dapat digunakan sabagai acuan adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional atau RPJP Provinsi, RPJM Nasional dan Provinsi, rencana tata ruang wilayah nasional / provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun secara sektoral. Dari sisi horisantal, RPJMD kabupaten / kota mengacu kepada RPJP kabupaten / kota, RTRW kota, dan dokumen perencanaan lainnya, baik yang telah disusun dan ditetapkan di kabupaten / kota yang bersangkutan, atau pun kabupaten / kota tetangga yang berbatasan langsung. Maksud dirujuknya semua dokumen perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program antar tingkat pemerintahan.

RPJMD juga disusun dengan memperhatikan statistic regional dan local, terutama data tentang PDRB dan data-data statistic, antara lain : (1) statistic berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat , keberadaan potensi sector unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi local dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sector informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistic fungsi-fungsi pemerintahan di bidang social budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka

kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat; (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah.

Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normative aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, pemerintah kota Pagar Alam dan DPRD kota Pagar Alam menyusun rangkaian dokumen perencanaan daerah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP – Daerah), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM – Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM – Daerah), yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP – daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikator rencana program 5 (lima) tahunan secara lintas sumber pembiayaan.
3. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra – SKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM daerah untuk setiap unit kerja daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikator rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda kota Pagar Alam
4. Rencana kerja SKPD (Renja – SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 2 (dua) tahun ke depan.
5. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota dan provinsi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD kota Pagar Alam tahun 2008-2013 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten / kota sebagai acuan / dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2008-2013 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama pemerintahan kota Pagar Alam 2008-2013.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD kota Pagar Alam tahun 2008-2013 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 2004

tentang system perencanaan pembangunan nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD dengan dokumen pembangunan lainnya, baik secara vertical maupun secara horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran , pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bias berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakn dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
6. Membagi pencapaian sasaran setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik ecara linta ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).
7. Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai kejayaan Pagar Alam untuk masa depan yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin.

RPJMD akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD dan Renstra SKPD merupakan turunan dari RPJP daerah.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antar lain :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 88, tambahan lembaran negar Ri nomor 4115)
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Ri nomor 4286)
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negar Ri nomor 4355)
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negar Ri nomor 4400)
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negar Ri nomor 4421)

6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara RI nomor 4437)
7. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara RI nomor 4438)
8. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran negara RI nomor 4405)
9. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara RI nomor 4725)
10. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara RI nomor 4578)
11. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2006, tambahan lembaran negara RI nomor 4514)
12. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara RI tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara RI nomor 4663)
13. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara RI nomor 4515)
14. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara RI nomor 4741)
15. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara RI nomor 4817)
16. Peraturan daerah Pagar Alam nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Pagar Alam tahun 2005-2025

1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana strategis kementerian / lembaga, rencana kerja kementerian / lembaga dan rencana kerja pemerintah (RKP).

Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka

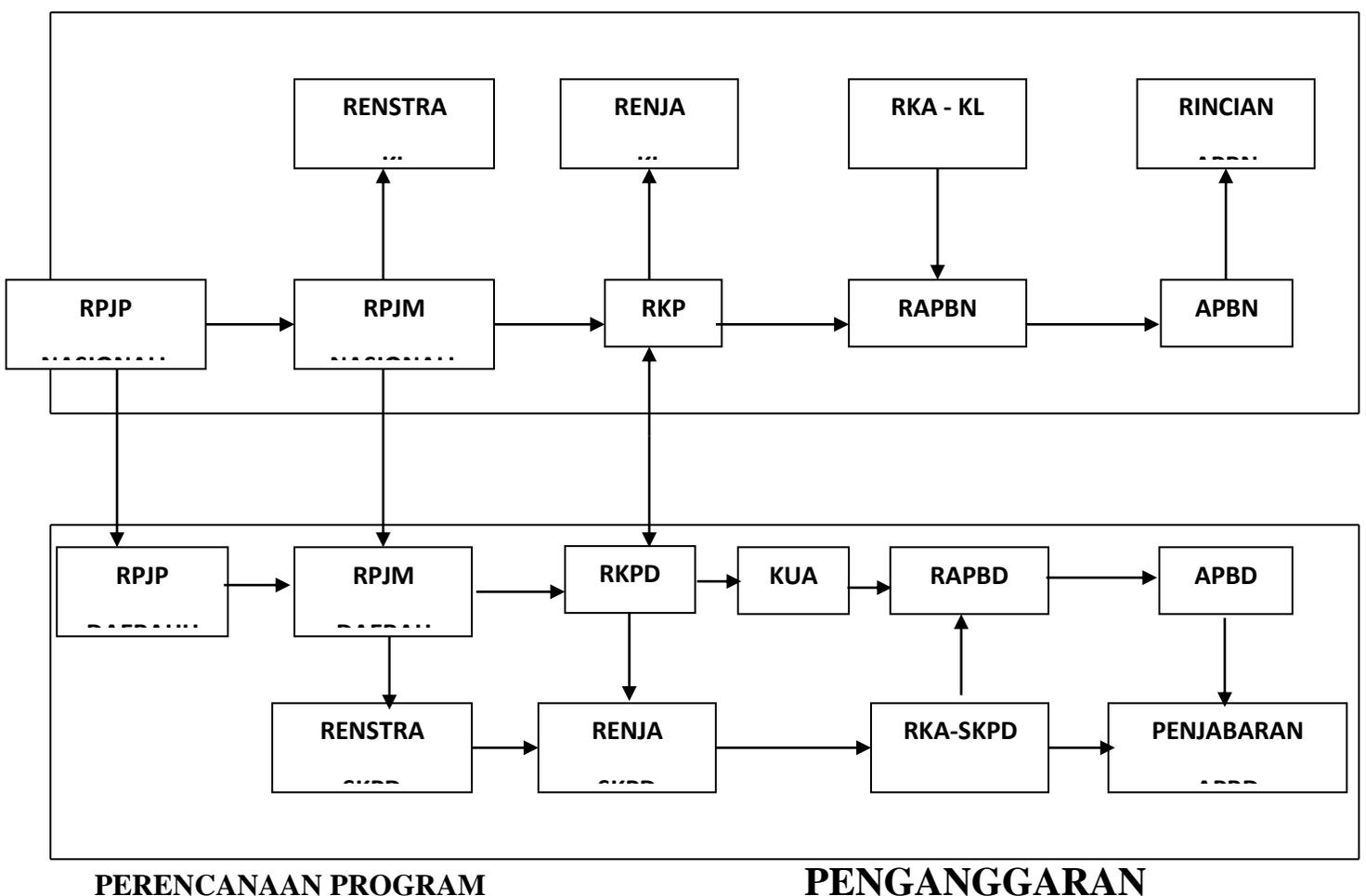
menengah daerah (RPJMD), rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) serta rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 5 ayat 2, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan, kerja perangkat daerah (SKPD). Lintas SKPD dan program kewilayaan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana pembvangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Pagar Alam akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam wilayah kota Pagar Alam dalam menyusun Renstra satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD), yang memuat antara lain visi, misi, tujuan, dan cara mencapai tujuan (strategi). Renstra satuan kerja perngkat daerah (Renstra-SKPD) juga memuat program-program dan kegiatan indikatif. Renstra satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dijabarkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berisi kebijakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan program kegiatan pembangunan. Program kegiatan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Kaitanya dengan system keuangan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangn Negara, maka penjabaran RPJMD kota Pagar Alam ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) kota Pagar Alam.

Bagan 1.1
Mekanisme Perencanaan dan Pembangunan



Proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Pagar Alam tahun 2008-2013 melalui beberapa tahap yaitu :

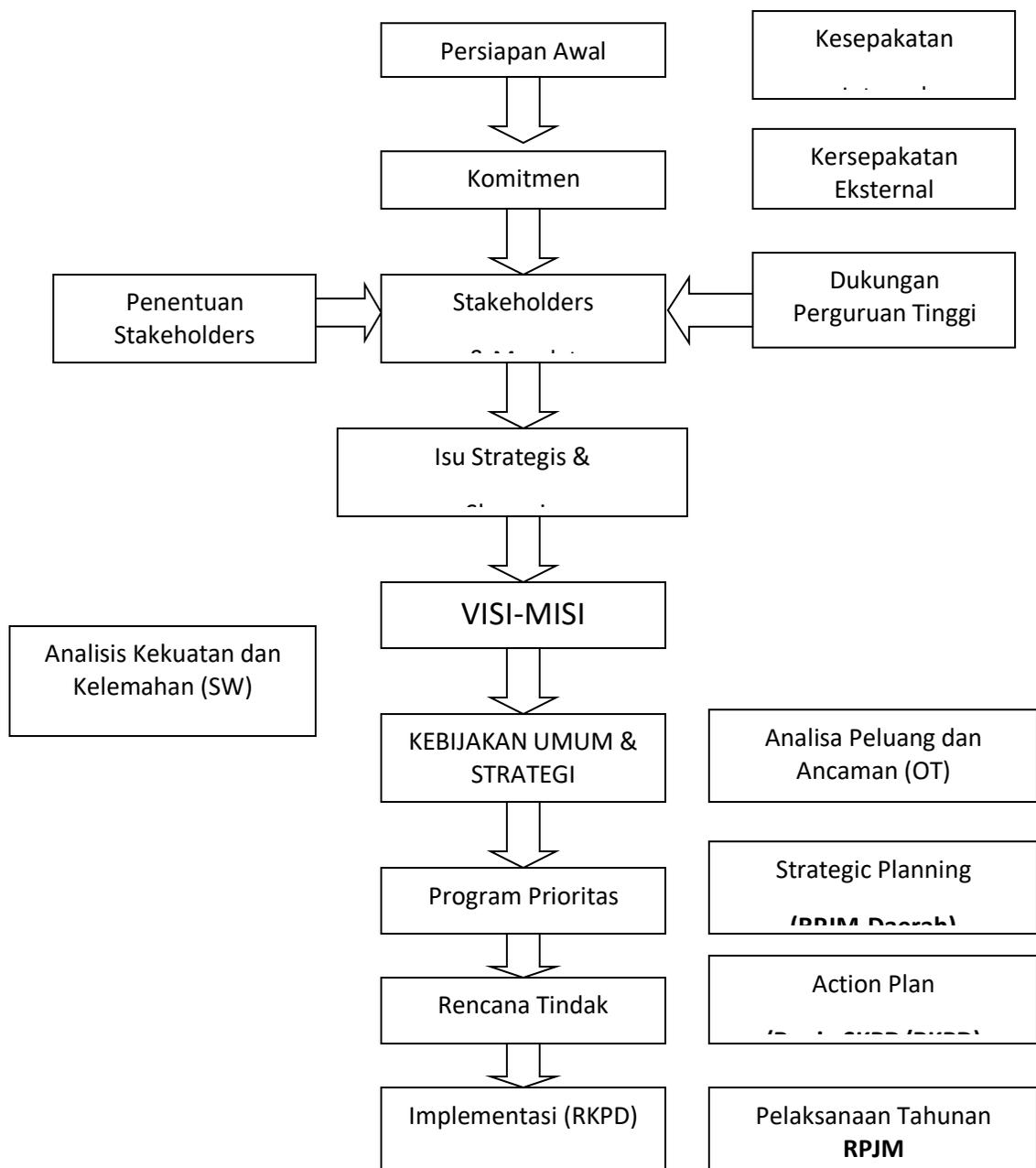
1. Tahap pertama adalah penyiapan rancangan awal RPJMD kota Pagar Alam tahun 2008-2013.
2. Tahap kedua adalah penyiapan rancangan Renstra SKPD.
3. Tahap ketiga adalah penyusunan rancangan RPJMD kota Pagar Alam tahun 2008-2013.
4. Tahap keempat adalah penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah kota Pagar Alam
5. Tahap kelima adalah penyusunan rancangan akhir RPJMD kota Pagar Alam dalam bentuk rancangan peraturan daerah
6. Tahap keenam adalah pengajuan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kota Pagar Alam kepada DPRD kota Pagar Alam untuk penetapannya.

1.5 POLA PIKIR DAN P-ROSES PENYUSUNAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJM daerah ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana bagan berikut ini :

Bagan 1.2

POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJM KOTA PAGAR ALAM



1.6 SISTEMATIKA PANULISAN

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Pagar Alam ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normative penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistic dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan social ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan kecenderungan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah, baik pajak daerah maupun retribusidaerah, termasuk bagian daerah dari labaperusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sertabagian penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta pola-pola alokasi belanja untuk setiap bidang pemerintahan dalam tiga tahun terakhir.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat penjelasan tentang kebutuhan dan permasalahan actual / krusial / penting yang dihadapi ,masyarakat maupun pemerintah daerah berdasarkan hasil hasil analisis lingkungan strategis, kondisi dan potensi daerah untuk mencapai target dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V VISI DAN MISI

Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

BABVI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi perumusan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program pembangunan daerah.

BAB VII ARAH KEBIJAKAN UMUM

Bab ini berisi tentang kebijakan umum yang merupakan pedoman penyusunan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah bagi setiap satuan kerja perangkat daerah, lintas astuan kerja perangkat daerah, dan kewilayaan.

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan program-program yang akan dilaksanakan pemerintah kota Pagar Alam dengan memperhatikan Renstra yang disiapkan masing-masing SKPD yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program (indikatif) yang tertuang dalam RPJMD kota Pagar Alam.

BAB IX INDIKATIR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan indicator kinerja daerah dengan Indeks Pembangunan Daerah (IPM) sebagai salah satu indicator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB X PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi serta proses, mekanisme dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJMD ini, mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan arahan kebijakan nasional.

BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Geografis

Kota Pagar Alam merupakan bagian wilayah provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak disebelah selatan dengan posisi wilayah berada pada 03^o59'45" Lintang Selatan dan 103^o07'00" - 103^o27'26" Bujur Timur. Wilayah kota Pagar Alam merupakan daratan dengan luas mencapai 63.366 Hektar dan dalam konteks regional terletak disekitar 298 Km dari ibu kota provinsi Sumatera Selatan dan berjarak sekitar 68 Km di sebelah Barat Daya ibu kota Kabupaten Lahat.

Letak kota Pagar Alam memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Jarai dan Pajar Bulan Kabupaten Lahat.

Sebelah Selatan : Provinsi Bengkulu.

Sebelah Timur : Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

Sebelah Barat : Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat

Wilayah kota Pagar Alam meliputi 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Adapun kecamatan yang berada di wilayah kota Pagar Alam adalah Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah dan Dempo Selatan.

Tofografi kota Pagar Alam merupakan daerah yang berbukit dan bergunung berketinggian 100-1000 M (Meter dari permukaan laut) dengan puncaknya Gunung Dempo (\pm 3.159 Meter). Selain itu wilayah ini adalah tempat tertinggi dan juga merupakan atap Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karenanya daerah ini berhawa dingin (sejuk) serta memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim rata-rata setiap tahun sekitar antara bulan Oktober s/d September. Penyimpanan kedua musim tersebut terjadi setiap 5 tahun sekali dimana musim hujan berkisar antara 2000-3000 mm dengan kelembapan udara berkisar antara 75 – 89 %.

Kota Pagar Alam mempunyai banyak sungai, diantaranya sungai Besemah Lemtang, sungai Selangis Besar, sungai Selangis Kecil, sungai Air Kundur, sungai Betung, sungai Air Perikan sedangkan sungai Endikat merupakan sungai yang membatasi dengan kecamatan kota Agung Kabupaten Lahat.

Suhu di kota Pagar Alam berkisar antar 14^o C sampai dengan 34^o C. Jarak wilayah kecamatan terdekat dengan ibukota pemerintahan adalah kecamatan Pagar Alam Utara sedangkan kecamatan yang terjauh dari ibu kota pemerintahan adalah kecamatan Dempo Selatan.

Bentuk permukaan tanah di daerah kota Pagar Alam bervariasi dari dataran sampai bergunung daerah yang mempunyai dataran yang mempunyai dataran yang cukup luas adalah kecamatan Pagar Alam Selatan dan kecamatan Pagar Alam Utara sementara daerah yang mempunyai permukaan bergunung adalah kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah mempunyai bentuk permukaan yang bergelombang.

Luas wilayah kota Pagar Alam 63.366 Ha (633,66 Km²), yang jenis lahannya sebagai berikut : tanah sawah tersiri dari : sawah irigasi, tadah hujan; tanah kering terdiri dari emplacement, kebun, kolam; tanah hutan terdiri dari hutan lebat, belukar, hutan lindung; tanah perkebunan, yaitu tanah perkebunan Negara, tanah umum; tanah fasilitas umum terdiri dari tanah untuk lapangan olahraga, tanah rekreasi, jalur hijau, kuburan.

Keadaan tanah di daerah Pagar Alam pada umumnya tanah kelas 1 (1) yang mengandung kesuburan tanah yang tinggi, hal ini terbukti daerah Kota Pagar Alam merupakan daerah penghasil sayur-mayur, buah-buahan, dan merupakan salah satu Sub Terminal Agribisnis (STA) di Propinsi Sumatera Selatan, selain itu keadaan tanah di daerah ini mengandung bahan Andozol yang terdapat di Kecamatan Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo Utara, Dempo Selatan dan Dempo Tengah. Kota Pagar Alam selain daerah pertanian juga merupakan potensi mineral dan bahan tambang. Bahan tambang golongan C yang sudah di usahakan oleh rakyat seperti : tanah liat, pasir, batu kali/gunugn yang terdapat di Kecamatan Dempo Selatan.

Tabel 2.1

Profil Penggunaan Lahan Menurut Jenis Dan Luas
Kota Pagar Alam Tahun 2007

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Perkampungan	2.021
2.	Persawahan	3.224
3.	Tegalan/ladang	2.674
4.	Kebun Campuran	1.137
5.	Perkebunan Rakyat	20.739
6.	Perkebunan Besar	2.175
7.	Tambak/tebat	350
8.	Alang-alang/semak	1.862
9.	Hutan	28.740
10.	Danau/rawa	461
11.	Lain-lain/jalan, sungai	
	Jumlah	63.366

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.2 Perekonomian Daerah

2.2.1 Potensi Sektoral Daerah

2.2.1.1 Pertanian Tanam Pangan

Sektor pertanian tetap mendapat prioritas utama dalam pembangunan daerah Pagar Alam. Hal ini karena sektor pertanian mendukung sector lainnya seperti sektor industri. Selain itu penyerapan tenaga terbesar adalah dari sektor pertanian dengan persentase terbesar pada sub sektor tanam pangan.

Luas panen padi sawah di Kota Pagar Alam tahun 2007 berjumlah 5.453 Hektar. Dari sejumlah luas panen tersebut menghasilkan produksi padi sebesar 26.174,4 ton. Dengan demikian, rata-rata produksi padi sebesar 4,8 ton/ha. disamping padi sawah, tanaman palawija juga banyak di tanam di daerah ini. Ubikayu misalnya selama Tahun 2007 berproduksi sebanyak 3.640 ton yang dihasilkan dari lahan seluas 87 Hektar. Tanaman palawija lainnya yaitu jagung menyumbang produksi 516,8 ton yang berasal dari lahan seluas 136 Hektar. Dengan demikian rata-rata produksi tanaman jagung adalah 3,8 ton / ha. Sementara itu tanaman ubu jalar pada tahun 2007 mencapai produksi 10.892 ton dengan luas panen sebesar 389 Hektar

Table 2.2
Data Luas Pertanaman, Produktivitas dan Total Produksi Padi dan Palawija
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Komoditi	Luas Panen (ha)	Rata-rata (ton/ha)	Total Produksi (ton)
1.	Padi Sawah	5.453	4,80	26.174,4
2.	Ubi Kayu	87	41,84	3.640,0
2.	Ubi Jalar	389	28,00	10.892,0
4.	Jagung	136	3,80	516,8

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Sebagai daerah yang didominasi dataran tinggi dengan kondisi lahan yang relative subur, kota Pagar Alam pun sangat potensial untuk pengembangan agrobisnis komoditi sayuran, pada akhir tahun 2007, tercatat bahwa produk sayuran didominasi komoditi kubis, sebanyak 15.120 ton, disusul sawi 7.125 ton, wortel 6.450 ton, bawang daun 2.330 ton, tomat 2010 ton,. Secara keseluruhan luas panen tanaman sayuran mencapai 2.315 Hektar dengan produksi mencapai 40.838 ton atau rata-rata 17,64 ton/ha.

Table 2.3
Data Luas Pertanaman, Produktivitas dan Total Produksi Sayuran
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Total Produksi (ton)	Rata-rata (ton/ha)
1.	Kubis	420	15.120	36
2.	Sawi	475	7.125	15
3.	Tomat	134	2.010	15
4.	Kentang	28	504	18
5.	Wortel	258	6.450	25
6.	Lobak	-	-	-
7.	Buncis	113	1.695	15
8.	Bawang Daun	233	2.330	10
9.	Labu Siam	13	299	23
10.	Ketimun	60	1.200	20
11.	Kacang Panjang	50	150	3
12.	Terong	130	1.950	15
13.	Cabe	371	1.855	5
14.	Kangkung	9	108	12
15.	Bayam	21	42	2
		2.315	40.838	17,64

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Sementara untuk buah-buahan, didominasi oleh pisang 339.340 ton, papaya 302.160 ton, alpukat 247.300 ton, salak 217 ton. Secara keseluruhan luas panen tanaman buah-buahan mencapai 68.689 hektar dengan produksi mencapai 1.520.895 ton.

Table 2.4**Data Luas Produktivitas dan Total Produksi Buah-buahan**

No	JenisTanaman	Luas Panen (ha)	Total Produksi (ton)	Rata-rata (ton/ha)
1.	Alpukat	12.365	247.300	20
2.	Belimbing	349	6.980	20
3.	Duku/langsat	-	-	-
4.	Duruan	2.383	59.575	50
5.	Jambu biji	1.098	54.900	35
6.	Jambu air	546	15.900	35
7.	Jruk	902	31.570	15
8.	Mangga	590	8.850	20
9.	Manggis	-	-	-
10.	Nangka/cempedak	3.079	138.555	20
11.	Papaya	5.036	302.160	60
12.	Pisang	16.967	339.340	20
13.	Rambutan	2.699	67.475	25
14.	Salak	12.700	217.000	10
15.	Sawo	-	-	-
16.	Sirsak	609	15.225	25
17.	sukun	459	16.065	35
Jumlah		68.689	1.520.895	22,14

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.2.1.2 Perkebunan dan Kehutanan

Kota Pagar Alam terkenal dengan produksi tanaman perkebunan, terutama kopi. Sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai pekebun kopi. Sehingga, fluktuasi harga kopi akhir-akhir ini berpengaruh terhadap ekonomi daerah secara makro. Disamping mengusahakan tanaman kopi, tanaman perkebunan lainnya seperti cengkeh, kelapa, lada, kemiri, kayu manis juga ditanam di daerah ini. Berikut akan disajikan produksi dan luas panen untuk masing-masing tanaman.

Table 2.5**Data Luas Pertanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Di kota Pagar Alam tahun 2007**

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)	Total Produksi (ton)
1.	Cengkeh	100	100,00
2.	Kelapa	104,5	116.229,00
3.	Karet	68	2.720,00
4.	Kopi	34.209	19.616,49
5.	Vanili	1,95	9,80
6.	Kemiri	25	18,70
7.	Kayu Manis	11,5	11,3
8.	Lada	62	39,75
9.	Coklat	225	2,04

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Dari table di atas terlihat bahwa tanaman kopi memiliki produksi paling besar jika dibandingkan tanaman perkebunan. Selain kopi, tanaman kelapa juga banyak ditanaman di daerah ini. Namun bila dilihat lebih teliti, tanaman karet sangat potensial untuk dikembangkan di daerah ini.

Luasnya kawasan hutan di Pagar Alam tahun 2007 kurang lebih 28.740 ha, yang kesemuanya mencakup hutan lindung.

Table 2.6
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Tetap Per Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Fungsi Hutan				Jumlah
		Hutan suaka alam	Hutan lindung	Hutan produksi terbatas	Hutan produksi tetap	
1.	Dempo Selatan	-	8.530	-	-	8.530
2.	Dempo Tengah	-	12.595	-	-	12.595
3.	Dempo Utara	-	4.755	-	-	4.755
4.	Pagar Alam Selatan	-	1.833	-	-	1.833
5.	Pagar Alam Utara	-	1.027	-	-	1.027
Jumlah		-	28.740	-	-	28.740

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.2.1.3 Peternakan

Peternakan di kota Pagar Alam juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Jumlah populasi ternak yang ada pada tahun 2007 terdiri dari : 137 ekor kerbau, 1.933 ekor sapi, 13.385 ekor kambing, 40 ekor domba dan 56 ekor kuda

Table 2.7
Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Per Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Jenis Ternak				
		Kerbau (ekor)	Sapi (ekor)	Kambing (ekor)	Domba (ekor)	Kuda (ekor)
1.	Dempo Selatan	132	896	964	-	40
2.	Dempo Tengah	5	394	1.985	-	13
3.	Dempo Utara	-	148	3.816	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	-	196	3.064	-	3
5.	Pagar Alam Utara	-	299	3.560	40	-
Jumlah		137	1.933	13.385	40	56

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Sementara itu, jenis unggas yang dipelihara di Kota Pagar Alam meliputi ayam kampung, ayam ras, itik, bebek, adan angsa.

Table 2.8
Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas Per Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Jenis Unggas		
		Ayam Kampung	Ayam Ras	Itik/bebek/angsa
1.	Dempo Selatan	12.720	-	1.872
2.	Dempo Tengah	9.730	-	715
3.	Dempo Utara	7.995	-	1.080
4.	Pagar Alam Selatan	9.974	-	1.600
5.	Pagar Alam Utara	9.660	-	1.570
Jumlah		50.079	-	6.837

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.2.1.4 Perikanan

Produksi ikan di kota Pagar Alam tahun 2007 berasal dari produksi ikan segar. Ikan-ikan tersebut berasal dari tempat pemeliharaan kolam, sawah, dan lainnya.

Table 2.9
Jumlah Produksi Ikan Darat Segar dan Pengawetan Ikan
menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Ikan Segar (ton)	Pengawetan (ton)	
			Asin	Salai
1.	Dempo Selatan	38,7	-	-
2.	Dempo Tengah	22,8	-	-
3.	Dempo Utara	46,5	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	125,6	-	-
5.	Pagar Alam Utara	42,7	-	-
Jumlah		276,3	-	-

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.10
Jumlah Produksi Ikan Darat Segar menurut Pengolahan Ikan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Ikan Segar Kolam + Sawah (ton)	Olahan	
			Asin	Salai
1.	Dempo Selatan	19,8	-	-
2.	Dempo Tengah	17,8	-	-
3.	Dempo Utara	40,4	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	51,7	-	-
5.	Pagar Alam Utara	27,6	-	-
Jumlah		157,3	-	-

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.11
Luas Areal dan Produksi Penangkapan Ikan Air Tawar di Sungai/Tebat
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Panjang Sungai (km)	Tebat (ha)	Produksi (ton)
1.	Dempo Selatan	76,56	16,5	6,4
2.	Dempo Tengah	37,57	17,0	7,2
3.	Dempo Utara	113,25	12,5	6,2
4.	Pagar Alam Selatan	118,27	6,5	3,4
5.	Pagar Alam Utara	111,41	7,0	4,6
Jumlah		457,06	59,5	27,8

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.2.1.5 Industri

Guna menunjang pembangunan daerah, pembangunan industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang bermutu dengan harga yang bersaing baik di dalam maupun di luar negeri.

Penyajian sector industri pada dasarnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Namun karena keterbatasan data yang ada hanya sebagian kecil saja informasi di bidang industri yang biasa ditampilkan. Sebagian saja informasi tersebut adalah industri hasil pertanian dan kehutanan. Industri kerajinan anyaman terdapat di kecamatan Dempo Selatan dengan jumlah unit usaha sebanyak 5 buah dan jumlah tenaga kerja 86 orang.

Table 2.12
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan per Kode Sentra Formal dan Nama Sentra
di kota Pagar Alam tahun 2007

Kode Sentra	Nama Sentra	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
16.04.3.002	Kerajinan Anyaman	P. Alam Selatan	9	19 orang
16.04.3.005	Kerajinan Anyaman Purun	Dempo Selatan	5	86 orang
	Kerajinan Meubel	P. Alam Utara	3	7 orang
Jumlah			5	112 orang

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.13
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi
Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka
di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp.000)	Produksi (Rp.000)
1.	Pakaian jadi dari tekstil	-	-	-	-
2.	Pakaian jadi	20	426	57.000.000	419
3.	Barang dari semen	-	-	-	-
4.	Barang dari tanah liat	-	-	-	-
5.	Barang dari batu	-	-	-	-
6.	Genteng dari tanah liat	-	-	-	-
7.	Perb. dan pemeliharaan	6	31	84.000	45.000
8.	Per pe. Alat pertanian	8	40	280.000	15.000
9.	Perb. dan pemeliharaan	-	-	-	-
10.	Kompor	-	-	-	-
11.	Vulkanisir ban	6	12	15.900.000	637
12.	Barang dari semen	-	-	-	-
13.	Alat optik	-	-	-	-
14.	Pengolahan lain	-	-	-	-
15.	Karoseri	5	20	160.000	144.000
16.	Pengolahan logam mulia	5	5	36.000.000	1.175
17.	Foto studio	5	22	171.000	250.000
18.	Foto copy	6	17	130.525.000	36.542
19.	Tukang gigi	3	3	25.000	15.000
20.	Garam yodium	-	-	-	-
21.	Pengupas kulit kopi	32	62	488.500.000	782
22.	Bahan kimia dan barang lain	98	332	519.153.770	41.416
Jumlah		194	570	1.247.798.770	549.971

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDRB) kota Pagar Alam dihitung dalam dua bentuk, yaitu atas harga dasar harga berlaku (ADHB) dan perhitungan atas dasar harga konstan (ADHK). Produk Domestik Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga dan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB kota Pagar Alam menggambarkan kemampuan kota Pagar Alam dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh Kota Pagar Alam sangat tergantung kepada kondisi sumber daya alam dan faktor produksi yang ada.

Table 2.14
PDRB Kota Pagar Alam Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha 2000 – 2007
(Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perkebunan	200.497	216.067	223.567	236.753	247.157	252.935	257.257	268.348
2.	Pertambangan & Penggalian	6.090	7.072	8.065	9.057	10.066	11.537	12.930	14.672
3.	Industri Pengelolaan	5.016	6.146	7.209	8.172	9.259	10.360	11.734	13.197
4.	Listrik, Gas, & Air Bersih	663	800	1.008	1.174	1.277	1.427	1.580	1.743
5.	Bangunan	34.698	44.522	54.509	64.521	76.861	93.864	110.506	129.298
6.	Perdagangan, Hotel, & Restoran	83.415	94.847	108.940	114.034	130.005	152.314	179.679	212.121
7.	Pengangkutan & Komunikas	13.653	17.144	19.964	23.336	28.384	44.649	57.896	73.178
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	23.148	28.220	32.691	37.206	40.807	44.389	49.322	53.281
9.	Jasa-jasa	59.275	66.418	69.768	80.051	92.399	101.293	110.286	121.967
PDRB Kota Pagar Alam		426.455	481.236	525.721	574.289	636.221	712.769	791.190	887.805

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.15
PDRB Kota Pagar Alam Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha 2000 - 2007

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perkebunan	200.497	201.372	204.448	207.680	209.049	210.492	211.870	214.513
2.	Pertambangan & Penggalian	6.090	6.532	7.049	7.459	7.808	8.373	8.556	6.865
3.	Industri Pengelolaan	5.016	5.169	5.406	5.587	5.744	6.017	6.077	6.142
4.	Listrik, Gas, & Air Bersih	663	710	762	820	850	885	915	944
5.	Bangunan	34.698	37.606	40.975	44.679	48.750	53.193	58.039	63.296
6.	Perdagangan, Hotel, & Restoran	83.415	88.090	91.838	94.968	98.980	102.075	107.624	114.145
7.	Pengangkutan & Komunikas	13.653	13.980	14.898	15.919	17.276	19.813	22.243	24.122
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	23.148	24.473	25.422	26.468	28.154	29.867	31.908	33.005
9.	Jasa-jasa	59.275	59.504	60.933	62.636	64.042	67.924	70.511	73.705
PDRB Kota Pagar Alam		426.455	426.455	438.944	453.275	468.116	498.639	517.743	538.737

(Juta Rupiah)

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Pada tahun 2007, PDRB kota Pagar Alam atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp. 887.805 juta. Dibanding tahun sebelumnya, mengalami peningkatan 10 % lebih. Relative kecilnya

peningkatan I ni disebabkan rendahnya PDRB sector pertanian karena belum membaiknya kondisi perusahaan perkebunan kopi rakyat disamping memang harga jual kopi masih sangat rendah.

Berbeda dengan harga berlaku, PDRB harga konstan yang sudah dihilangkan pengaruh kenaikan harganya, pada tahun 2007 berjumlah Rp. 538.737 juta atau meningkat 4,05 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 517.743 juta. Peningkatan PDRB yang relative kecil pada harga konstan ini merupakan gambaran belum membaiknya kondisi perekonomian utamanya sektor-sektor dominan, antar lain sektor pertanian yang hanya meningkat dari Rp. 211.870 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 214.513 juta pada tahun 2007.

Table 2.16
Distribusi Persentase PDRB Kota Pagar Alam Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%) 2000 – 2007

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perkebunan	47,01	44,90	45,53	41,23	38,85	35,49	32,52	30,23
2.	Pertambangan & Penggalian	1,43	1,47	1,53	1,58	1,58	1,62	1,63	1,65
3.	Industri Pengolahan	1,18	1,28	1,37	1,42	1,46	1,45	1,48	1,49
4.	Listrik, Gas, & Air Bersih	0,16	0,17	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5.	Bangunan	8,14	9,25	10,37	11,23	12,08	13,17	13,97	14,56
6.	Perdagangan, Hotel, & Restoran	19,56	19,71	20,72	19,86	20,43	21,37	22,71	23,89
7.	Pengangkutan & Telekomunikasi	3,20	3,56	3,80	4,06	4,46	6,26	7,32	8,24
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	5,43	5,86	6,22	6,48	6,41	6,23	6,23	6,00
9.	Jasa-jasa	13,90	13,80	13,27	13,94	14,52	14,21	13,94	13,74
PDRB Kota Pagar Alam		100,00							

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Dari table diatas dapat dilihat dari struktur perekonomian kota Pagar Alam atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sektor pertanian tetap mendominasi perekonomian kota Pagar Alam dengan sumbangan terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 30,23 %; kemudian diikuti perdagangan, hotel & restaurant dengan kontribusi sebesar 23,89 %. Sektor bangunan berada pada urutan ketiga yaitu dengan 14,56 %; kemudian diikuti sektor jasa-jasa 13,74 %; sektor pengangkutan dan komunikasi 8,24 %; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,00 %; sektor pertambangan dan penggalian 1,65 %; sektor industri pengolahan 1,49 %, dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 0,20 %.

Table 2.17
Distribusi Persentase PDRB Kota Pagar Alam Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (%) 2000 – 2007

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perkebunan	47,01	46,03	45,26	44,55	43,40	42,21	40,92	39,82
2.	Pertambangan & Pengegalian	1,43	1,49	1,56	1,60	1,62	1,68	1,65	1,65
3.	Industri Pengolahan	1,18	1,18	1,20	1,20	1,19	1,21	1,17	1,14
4.	Listrik, Gas, & Air Bersih	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
5.	Bangunan	8,14	8,60	9,07	9,58	10,12	10,67	11,21	11,75
6.	Perdagangan, Hotel, & Restoran	19,56	20,14	20,33	20,37	20,55	20,47	20,79	21,19
7.	Pengangkutan & Telekomunikasi	3,20	3,20	3,30	3,41	3,59	3,97	4,30	4,48
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	5,43	5,59	5,63	5,68	5,85	6,99	6,16	6,13
9.	Jasa-jasa	13,90	13,60	13,49	13,43	13,50	13,62	13,62	13,68
PDRB Kota Pagar Alam		100,00							

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Apabila faktor perubahan harga dieliminasi dengan mengambil harga konstan 2000, maka pada tahun 2007 sektor pertanian juga mendominasi pembentukan PDRB kota Pagar Alam, yaitu sebesar 39,82 %; kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,19 %; sektor jasa-jasa sebesar 13,68 %; sektor pembangunan 11,75 %; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,13 %. Sementara sektor-sektor lainnya seperti pengangkutan dan komunikasi; pertambangan dan pengegalian; industri pengolahan, serta listrik, gas dan air bersih masih dibawah lima persen.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam era otonomi daerah, tiap-tiap kabupaten/kota diberi kewenangan yang luas untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD). Dari data yang ada menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah untuk kota Pagar Alam tahun 2007 mencapai Rp. 2.314.105.152,- dari target Rp. 2.474.324.000,-. Sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 1.097.040.273,- dari target penerimaan pajak Rp. 740.705.000,-. Pajak daerah sebagian besar berasal dari pajak penerangan jalan raya yang mencapai Rp. 550.000.000,-. Sedangkan penerimaan sektor retribusi dari yang ditargetkan Rp. 1.853.719.000,- tercapai sebesar Rp. 1.274.403.780,-.

Table 2.18
Target dan Realisasi Penerimaan Daerah
Kota Pagar Alam tahun 2007

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Daerah	740.705.000	1.097.040.273	148,11
2.	Retribusi	1.853.719.000	1.274.403.780	68,75
3.	Penerimaan lain-lain	2.085.000.000	4.498.726.870	215,77
4.	Bagi hasil pajak/bukan pajak	96.669.690.000	101.111.789.209	104,59
5.	Dana Alokasi Umum	163.339.000.000	164.109.902.000	100,47
6.	Dana Alokasi Khusus	24.230.000.000	23.646.200.000	97,59
7.	Danan adhoc	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00
8.	Bagi hasil pajak provinsi	11.091.744.000	17.161.367.571	154,72
Jumlah		320.009.858.930	322.899.438.695	

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam 2007

Table 2.19
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kota Pagar Alam tahun 2007

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak hotel	42.705.000	242.368.477	567,54
2.	Pajak hiburan	4.000.000	4.310.000	107,70
3.	Pajak reklame	12.000.000	17.488.203	147,40
4.	Pajak penerangan jalan	550.000.000	637.456.662	115,90
5.	Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C	105.000.000	160.379.681	152,74
6.	Pajak Pendaftaran perusahaan	31.000.000	34.837.750	112,38
Jumlah		740.750.000	1.097.040.273	148,15

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam 2007

Table 2.20
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Kota Pagar Alam tahun 2007

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pelayanan kesehatan	254.965.000	269.202.375	105,58
2.	Pelayanan persampahan	130.000.000	42.148.746	32,42
3.	Penggantian biaya cetak KTP, KK & Akte Capil	90.000.000	37.813.500	42,01
4.	Parker tepi jalan umum	60.000.000	59.900.000	99,83
5.	Retribusi pengujian kend. Bermotor	12.100.000	9.002.000	74,40
6.	Retribusi uang leges	42.000.000	22.310.000	53,11
7.	Retribusi surat keterangan kelahiran	60.000.000	48.504.500	80,51
8.	Retribusi pelayanan keamanan	60.000.000	0	0,00
9.	Pemakaian kekayaan daerah	130.000.000	87.273.000	67,13
10.	Retribusi pasar grosir/pertokoan	115.672.000	56.250.000	48,62
11.	Retribusi jasa usaha terminal	156.000.000	7.010.000	4,49
12.	Pesanggrahan/villa	150.000.000	183.000.800	122,00
13.	Rumah potong hewan	30.000.000	14.145.000	47,15
14.	Tempat rekreasi dan olahraga	27.000.000	14.840.000	54,96
15.	Air Pam	374.482.000	305.522.760	81,58
16.	Izin mendirikan bangunan	50.000.000	81.322.099	162,64
17.	Izin trayek	10.000.000	1.250.000	12,5

18.	Izin usaha jasa konstruksi	40.000.000	1.200.000	3,00
19.	Pemanfaatan kayu	36.000.000	640.000	1,78
20.	Izin usaha angkutan umum	9.000.000	6.980.000	77,55
21.	Retribusi SITU	16.500.000	23.800.000	144,24
Jumlah		1.853.719.000	1.274.403.780	68,75

Sumber : Laporan Keuangan, Bagian Keuangan Setda Kota Pagar Alam 2007

2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Daerah

2.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana mutlak dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini komposisi penduduk kota Pagar Alam tahun 2007.

Table 2.21
Penduduk Berumur 10 tahu keatas yang menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk yang bekerja usia 10 tahun keatas	Persentase (%)
1.	Tidak punya Ijazah SD	17.711	17,90
2.	SD/MI/Sederajat	32.552	32,78
3.	SLTP/MTs/Seerajat	18.390	18,53
4.	SLTA/MA/Sederajat	22.601	22,77
5.	SM Kejuruan	3.899	3m93
6.	D1,D2	932	0,94
7.	D3/Sarmud	636	0,64
8.	D4/S1	2.436	2,45
9.	S2,S3	57	0,06
Jumlah		99.274	100,00

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Masih banyaknya jumlah penduduk di Kota Pagar Alam yang tidak memiliki ijazah SDD (17,90 %) dan hanya menamatkan jenjang pendidikan sampai dengan SD atau sederajat (32,78 %) menunjukkan bahwa pendidikan di kota Pagar Alam sudah sewajarnya mendapatkan penanganan yang serius. Sampai dengan tahun 2007, jumlah sarana pendidikan yang ada di Kota Pagar terdiri dari 14 buah TK, 82 buah SD, 14 buah SLTP, dan 13 SMA/SMK dengan tenaga pengajar sebanyak 155 orang untuk tingkat SLTA, 251 untuk tingkat SLTP, dan 539 untuk tingkat SD.

Table 2.22
Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Ruang Kelas	Guru	Murid
1.	Dempo Selatan	-	-	-	-	-
2.	Dempo Tengah	-	-	-	-	-
3.	Dempo Utara	-	-	-	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	5	-	-	8	702
5.	Pagar Alam Utara	9	-	-	11	288
Jumlah		14	-	-	19	990

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.23
Jumlah Sekolah, Gedung, Ruang Kelas, Guru, Murid SD Negeri dan Swasta
Menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Ruang Kelas	Guru	Murid
1.	Dempo Selatan	11	24	144	90	1.455
2.	Dempo Tengah	11	22	156	85	1.537
3.	Dempo Utara	14	34	204	124	1.794
4.	Pagar Alam Selatan	27	60	360	325	5.963
5.	Pagar Alam Utara	19	64	384	149	4.387
Jumlah		82	204	1.248	773	15.139

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.24
Jumlah Sekolah, Gedung, Ruang Kelas, Guru, Murid SMP Negeri dan Swasta
Menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Ruang Kelas	Guru	Murid
1.	Dempo Selatan	1	5	30	33	533
2.	Dempo Tengah	2	17	94	51	670
3.	Dempo Utara	2	4	24	51	762
4.	Pagar Alam Selatan	6	35	206	204	2.611
5.	Pagar Alam Utara	4	27	152	145	1.655
Jumlah		14	88	506	484	6.231

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.25
Jumlah Sekolah, Gedung, Ruang Kelas, Guru, Murid SMA/SMK Negeri dan Swasta
Menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Sekolah	Gedung	Ruang Kelas	Guru	Murid
1.	Dempo Selatan	1	3	18	26	261
2.	Dempo Tengah	2	9	44	66	938
3.	Dempo Utara	1	5	30	49	494
4.	Pagar Alam Selatan	3	7	53	76	2.111
5.	Pagar Alam Utara	6	17	102	86	2.728
Jumlah		13	41	247	303	6.532

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.26
Lembaga Pendidikan tinggi, Mahasiswa dan Tenaga Pengajar
di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Lembaga Pendidikan	Mahasiswa		Tenaga pengajar
		Laki-laki	Perempuan	
1.	STKIP Muhammadiyah	187	235	40
2.	STIE Lembah Dempo	477	338	32
3.	Amik Lembah Dempo	101	115	18
Jumlah		765	678	90

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.3.2 Kesehatan

Bidang kesehatan juga penting untuk diperhatikan. Tingkat kesehatan penduduk akan menjadi salah satu barometer dalam melihat keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Beberapa informasi di bidang kesehatan menyebutkan bahwa jumlah bayi yang mendapatkan vaksinasi BCG di kota Pagar Alam pada tahun 2007 adalah 2.757 orang. Angka ini meningkat jika dibanding tahun 2006 yang mencapai 2.157 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa cakupan program imunisasi yang meningkat atau jumlah bayi yang bertambah. Disamping itu jumlah tenaga kesehatan yang ada di kota Pagar Alam pada tahun 2007 adalah 2 orang dokter spesialis, 9 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 57 orang bidan, dan 71 orang tenaga medis lainnya. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 122.440 jiwa, maka tenaga kesehatan di daerah ini tentu masih kurang. Apalagi bila dilihat dari jumlah kesehatan yang ada hanya terdiri dari 1 rumah sakit, 6 buah puskesmas, dan 18 buah puskesmas pembantu.

Table 2.27
Jumlah Dokter dan Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

Kecamatan	Dokter			Tenaga Kesehatan				
	Umum	Spesialis	Gigi	Sarmud	Bidan	Apoteker	Asisten	Perawat
Dempo Selatan	2	-	-	-	4	-	1	10
Dempo Tengah	-	-	1	-	11	-	2	9
Dempo Utara	2	-	-	-	13	-	2	10
Pagar Alam Selatan	3	-	-	-	18	-	1	18
Pagar Alam Utara	2	2	-	-	11	1	3	14
Jumlah	9	2	1	-	57	1	9	61

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.28
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Bidan BKIA menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas	Puskesmas pembantu	Balai pengobatan	Bidan BKIA
1.	Dempo Selatan	-	1	6	-	4
1.	Dempo Tengah	-	-	3	-	11
3.	Dempo Utara	-	2	4	-	13
4.	Pagar Alam Selatan	-	2	4	-	18
5.	Pagar Alam Utara	1	1	1	1	11
	Jumlah	1	6	18	1	57

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.29
Jumlah Bayi yang mendapatkan Vaksinasi menurut Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

Kecamatan	2006				2007			
	BCG	DPT3	Pol3	HB3	BCG	DPT3	Pol3	HB3
Dempo Selatan	348	209	321	184	485	350	350	350
Dempo Tengah	354	251	353	184	362	360	361	360
Dempo Utara	349	298	484	411	614	537	556	537
Pagar Alam Selatan	736	629	693	637	726	711	646	711
Pagar Alam Utara	530	284	530	274	570	641	574	641
Jumlah	2.157	1.671	2.381	1.690	2.757	2.599	2.487	2.599

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.3.3 Listrik

Untuk mendorong dan merangsang kegiatan ekonomi penduduk yang lebih produktif seperti kegiatan industri dan kerajinan rumah tangga serta kegiatan bisnis lainnya, maka perlu ditingkatkan kesejahteraan rakyat baik di tingkat pedesaan maupun perkotaan melalui pelayanan pelistrikan.

Jumlah kelurahan di kota Pagar Alam yang dialiri listrik PLN berjumlah 35 kelurahan. Dengan demikian seluruh pengadaan/ketersediaan listrik yang mengarah ke pemenuhan industri kecil dan rumah tangga, sudah mendapat aliran listrik PLN. Pelanggan listrik berjumlah 19.794 konsumen yang menyebar di lima kecamatan. Konsumen terbanyak berpusat di daerah perkotaan yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan.

Table 2.30
Jumlah Kelurahan yang mendapat Aliran Listrik dan Pelanggan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah keseluruhan terlayani listrik	Jumlah pelanggan (rumah tangga)
1.	Dempo Selatan	5	1.728
2.	Dempo Tengah	5	1.825
3.	Dempo Utara	7	3.134
4.	Pagar Alam Selatan	8	6.655
5.	Pagar Alam Utara	10	6.422
Jumlah		35	19.794

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.3.4 Air Minum

Kebutuhan air minum merupakan kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan air minumberasal sri air bersih sangat menunjang dalam pembangunan kesehatan. Disamping untuk minum, air bersih sangat dibutuhkan untuk memasak, mandi dan mencuci.

Menyadari akan hal ini, pemerintah daerah membentuk suatu instansi khusus yang berkompeten dalam hal penyediaan air bersih, yaitu PDAM. Di kota Pagar Aalm, pada tahun 2007 jumlah pelanggan PDAM berjumlah 2.065 dengan rincian : 1.721 rumah tangga, 48 badan social, 21 kran umum, 235 toko dan 40 instansi pemerintah.

Table 2.31
Jumlah Pelanggan Air Minum
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Rmh tangga	Hotel/ industri	Badan sosial	Kran umum	Toko	Pemerintah	Jumlah
1.	Dempo Selatan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dempo Tengah	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dempo Utara	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	884	-	29	9	119	26	1.067
5.	Pagar Alam Utara	837	-	19	12	116	14	998
Jumlah		1.721	0	48	21	235	40	2.065

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.3.5 Kebersihan Kota

Sarana kebersihan di kota Pagar Alam pada tahun 2007 meliputi 15 buah tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan 1 buah tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Table 2.32
Jumlah TPS dan TPA
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	TPS	TPA	Luas TPA (M2)
1.	Dempo Selatan	-	-	-
2.	Dempo Tengah	-	-	-
3.	Dempo Utara	-	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	8	1	40.000
5.	Pagar Alam Utara	7	-	-
Jumlah		15	1	40.000

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Selain itu, pada tahun 2007 fasilitas kebersihan lain yang ada adalah 10 buah truk pengangkut sampah dan 96 orang petugas kebersihan.

Table 2.33
Jumlah Fasilitas Kebersihan dan Petugas Kebersihan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Truk pengangkut sampah	Petugas kebersihan	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Dempo Selatan	-	-	-
2.	Dempo Tengah	-	-	-
3.	Dempo Utara	-	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	5	33	14
5.	Pagar Alam Utara	5	33	16
Jumlah		10	66	30

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.3.6 Transfortasi dan Telekomunikasi

Perhubungan dan telekomunikasi berperan penting bagi kelancaran arus barang dan jasa dari sentra produksi ke tempat konsumen, baik di kota maupun pedesaan. Untuk mnunjang kelancaran transportasi darat di kota Pagar Alam dilakukan upaya terus menerus terhadap jalan-jalan umum. Dari data yang ada disebutkan bahwa panjang jalan keseluruhan di daerah ini mencapai 504,35 km yang terdiri dari 26,5,85 km jalan aspal, 238,5 km jalan kerikil dan tanah. Disamping itu, dilengkapi sarana jembatan sebagai penghubung dengan jumlah keseluruhan mencapai 89 unit jembatan dengan rincian 6 jembatan kayu, 80 jembatan beton, dan 3 unit jembatan besi.

Table 2.34
Panjang Jalan pada Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder
Menurut Pengerasan Jalan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Jumlah
1.	Dempo Selatan	29,19	11,24	88,76	129,19
2.	Dempo Tengah	47,98	5,50	45,77	99,25
3.	Dempo Utara	29,93	15,00	29,50	74,43
4.	Pagar Alam	102,33	17,10	6,75	126,18

	Selatan				
5.	Pagar Alam Utara	56,42	5,00	13,88	75,30
Jumlah		265,85	53,84	184,66	504,35

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.35
Jumlah Jembatan pada Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder
Menurut Jenisnya
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah jembatan (unit)		
		Kayu	Beton	Besi
1.	Dempo Selatan	3	14	-
2.	Dempo Tengah	1	20	-
3.	Dempo Utara	2	12	-
4.	Pagar Alam Selatan	-	12	3
5.	Pagar Alam Utara	-	13	-
Jumlah		6	80	3

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Sarana angkutan umum di Kota Pagar Alam meliputi angkutan luar kota (bis) dan dalam kota (oplet) dengan jumlah keseluruhan angkutan yang beroperasi pada tahun 2007 sebanyak 470 kendaraan, dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada table berikut ini :

Table 2.36
Jumlah Angkutan Menurut Trayek dan Tahun Pembuatan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Trayek	Tahun pembuatan			Jumlah
		<1990	1990-1995	>1990	
1.	Luar kota (bis)	-	17	32	49
2.	Dalam kota (oplet)				
	- Terminal Tj. Aro	38	78	26	142
	- Terminal Gn. Dempo	52	38	20	110
	-Terminal Bumi Agung	57	55	9	81
	-Terminal Pelang Kenidai	35	36	17	88
Jumlah		182	224	104	470

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Kegiatan di bidang telekomunikasi di kota Pagar Alam meliputi telepon, telex dan telegram. Meningkatnya telekomunikasi di kawasan ini dapat menunjang kegiatan di kawasan internasional. Jumlah pesawat telepon yang digunakan pada tahun 2007 sebanyak 3.310 SST

Table 2.37
Jumlah Angkutan Menurut Trayek dan Tahun Pembuatan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Dempo Selatan	60 sst
2.	Dempo Tengah	121
3.	Dempo Utara	49 sst
4.	Pagar Alam Selatan	2.100 sst
5.	Pagar Alam Utara	980 sst
Jumlah		3.310 sst

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Disamping itu penunjang kegiatan telekomunikasi lainnya adalah kegiatan pos. kegiatan pos di kota Pagar Alam selama tahun 2007 cukup aktif. Hal ini bias dilihat dari keluar masuknya surat, materai, perangko maupun kegiatan pos lainnya selama tahun 2007. jumlah surat yang terkirim mencapai 11.947 buah surat terdiri dari 2.479 surat biasa dan 9.466 surat kilat.

Table 2.38
Jumlah Angkutan Menurut Trayek dan Tahun Pembuatan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Bulan	Dikirim		Diterima	
		Surat tercatat	Surat biasa	Surat tercatat	Surat biasa
1.	Januarai	23	246	60	1.106
2.	Februari	15	142	31	920
3.	Maret	28	169	59	1.053
4.	April	21	193	61	1.020
5.	Mei	20	221	52	1.102
6.	Juni	32	201	49	1.119
7.	Juli	19	167	44	1.131
8.	Agustus	21	160	56	1.092
9.	September	30	232	59	1.029
10.	Oktober	28	215	39	958
11.	November	31	124	43	4.097
12.	Desember	26	115	39	5.967
Jumlah		294	2.185	592	20.774

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Kegiatan surat kilat khusus merupakan kegiatan pos yang potensial. Pada tahun 2007, kegiatan ini menghasilkan devisa sebesar Rp. 77.494.848,00.

Table 2.39
Jumlah Surat Kilat Khusus yang Dikirim/Diterima Melalui Kantor Pos dan
Giro Per Bulan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Bulan	Kilat Khusus		Biaya kilat khusus (besar uang (Rp))
		Kirim	Terima	
1.	Januari	740	1.204	6.417.088
2.	Februari	657	1.120	4.112.200
3.	Maret	837	2.430	8.415.100
4.	April	806	2.112	6.342.400
5.	Mei	902	2.950	8.437.660
6.	Juni	736	1.190	6.370.800
7.	Juli	891	2.614	6.425.800
8.	Agustus	747	1.206	6.361.000
9.	September	753	1.300	5.438.000
10.	Oktober	791	1.510	5.733.600
11.	November	976	2.983	8.573.500
12.	Desember	640	1.109	4.827.700
Jumlah		9.466	21.728	77.494.848

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Table 2.40
Jumlah Benda-benda Pos yang Terjual Melalui Kantor Pos Giro
di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Bulan	Perangko	Amplop
		Besar uang (Rp)	Besar uang (Rp)
1.	Januarai	2.620.000	88.000
2.	Februari	1.900.000	44.000
3.	Maret	2.085.000	52.800
4.	April	2.340.000	35.200
5.	Mei	2.460.000	26.400
6.	Juni	2.900.000	52.800
7.	Juli	4.030.000	8.800
8.	Agustus	2.927.000	24.600
9.	September	3.391.000	44.000
10.	Oktober	3.450.000	35.200
11.	November	2.400.000	44.000
12.	Desember	3.150.000	-
Jumlah		34.193.000	455.800

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.3.7 Perdagangan

Mulai tahun 1998 SIUP diterbitkan oleh Kanwil Disperindag Propinsi Sumatera Selatan di Palembang, sedangkan wewenang Diperindag kota Pagar Alam hanya menerbitkan TDP. Untuk investasi diatas Rp. 20.000.000 diberikan SIUP, dan investasi sampai dengan Rp. 20.000.000 diberikan TDP. Pada tahun 2007 telah diterbitkan 69 buah SIUP dan 66 buah TDP.

Table 2.41
Banyaknya Penerbitan SIUP dan TDP
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Banyaknya SIUP	Banyaknya TDP
1.	Dempo Selatan	2	-
2.	Dempo Tengah	1	1
3.	Dempo Utara	1	1
4.	Pagar Alam Selatan	53	51
5.	Pagar Alam Utara	12	13
Jumlah		69	66

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Agar kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan baik, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga para penjual dapat menyajikan barangnya kepada pembeli, dan pembeli dapat berbelanja dengan tenang, mudah dan aman.

Sarana perdagangan di kota Pagar Alam pada tahun 2007 meliputi 429 buah los pasar inpres, 274 kios, 1 buah pasar swadaya, dan 3 buah kalangan (mingguan).

Table 2.42
Jumlah Pasar Inpres, Pasar Swadaya, Kios, dan Kalangan
Per Kecamatan di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Pasar Inpres	Pasar Swadaya	Kios	Pasar Mingguan (kalangan)
1.	Dempo Selatan	-	-	-	1
2.	Dempo Tengah	-	-	-	-
3.	Dempo Utara	-	1	-	2
4.	Pagar Alam Selatan	429	-	-	-
5.	Pagar Alam Utara	-	-	447	-
Jumlah		429	1	474	3

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

2.4 Sosial Budaya Daerah

2.4.1 Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk kota Pagar Alam pada tahun 2007 adalah 122.440 jiwa dengan rincian 61.367 laki-laki dan 61.073 perempuan.

Table 2.43
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan dalam
kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex ratio
1.	Dempo Selatan	6.651	6.384	13.035	104,18
2.	Dempo Tengah	5.926	6.776	12.742	88,05
3.	Dempo Utara	9.782	10.146	19.928	96,41
4.	Pagar Alam Selatan	21.641	19.683	41.324	109,95
5.	Pagar Alam Utara	17.327	18.084	35.411	95,81
Jumlah		61.367	61.073	122.440	100,48

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Rata-rata penduduk per rumah tangga di kota Pagar Alam adalah 4,19 sebagaimana ditunjukkan pada table berikut ini :

Table 2.44
Jumlah dan Rata-rata Penduduk Per Rumah Tangga Per Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Rumah tangga	Penduduk	Rata-rata penduduk per KK
1.	Dempo Selatan	3.277	13.035	3,98
2.	Dempo Tengah	2.924	12.742	4,36
3.	Dempo Utara	5.145	19.928	3,87
4.	Pagar Alam Selatan	9.744	41.324	4,24
5.	Pagar Alam Utara	8.124	35.411	4,36
Jumlah		29.214	122.440	4,19

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas dalam status bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang berusia 65 tahun keatas (usia lanjut) yang tidak mampu

bekerja lagi dan kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang lain atau sebaliknya penduduk yang berusia kurang dari 10 tahun meskipun telah bekerja guna memenuhi/ membantu kebutuhan hidup bukan kategori angkatan kerja. Jumlah usia kerja yang ada di kota Pagar Alam pada tahun 2007 berjumlah 93.763 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 94,45 % penduduk kota Pagar Alam sebagai penduduk usia kerja.

Table 2.45
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis kegiatan Utama
Di kota Pagar Alam tahun 2007

Jenis kegiatan Utama	Penduduk usia 10 keatas	Persentase (%)
Usia kerja	93.763	94,45
Angkatan kerja :	<u>52.667</u>	<u>53,06</u>
1. Bekerja	50.735	51,11
2. Mencari kerja	1.932	1,95
Bukan Angkatan Kerja :	<u>41.096</u>	<u>41,39</u>
3. Sekolah	17.571	17,70
4. Mengurus rumah tangga	18.518	18,65
5. Lainnya	5.007	5,04
Tingkat Pengangguran (%)	3,67	
Bukan Usia Kerja	5.411	5,55
Jumlah	99,27	100,00

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar Alam 2007

Sektor pertanian merupakan sector yang menyerap jumlah tenaga kerja terbesar (60,51%) dari semua lapangan lkerja di kota Pagar Alam pada tahun 2007, sebagaimana ditunjukkan pada table berikut ini :

Table 2.46
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kategori Lapangan
Usaha di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Penduduk yang bekerja usia 10 tahun keatas	Persentase (%)
1.	Pertanian	30.698	60,15
2.	Perikanan	135	0,27
3.	Industri makanan/minuman	44	0,09
4.	Industri kayu	1.460	2,88
5.	Industri furniture	805	1,59
6.	Ketenagalistrikan	6.779	13,36
7.	Konstruksi	443	0,87
8.	Penjualan/repairasi mobil/motor	2.046	4,03
9.	Perdagangan besar	223	0,44
10.	Perdagangan eceran	88	0,17
11.	Angkutan jalan raya	2.006	3,95
12.	Jasa penunjang angkutan	1.746	3,44
13.	Jasa perusahaan	627	1,24
14.	Jasa pemerintahan	1.857	3,66
15.	Jasa pendidikan	1.241	2,45
16.	Jasa kesehatan	536	1,06
17.	Jasa hiburan	679	1,33

18.	Jasa kegiatan lainnya	135	0,27
19.	Jasa perseorangan melayani RT	44	0,09
20.	lainnya	1.460	2,88
Jumlah		50.735	100,00

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar tahun 2007

2.4.2 Agama

Dari total penduduk kota Pagar Alam tahun 2007, yaitu 122.440 orang, sebanyak 121.786 diantara atau lebih dari 99 % memeluk agama islam.

Table 2.47
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Menurut Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Penganut					Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	
1.	Dempo Selatan	13.035	-	-	-	-	13.035
2.	Dempo Tengah	12.740	-	2	-	-	12.742
3.	Dempo Utara	19.928	-	-	-	-	19.928
4.	Pagar Alam Selatan	40.896	207	75	141	5	41.324
5.	Pagar Alam Utara	35.187	62	107	19	36	35.411
Jumlah		121.786	269	184	160	41	122.440

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar tahun 2007

Sarana ibadah yang ada dikota Pagar Alam meliputi 186 masjid, 8 langgar, 20 musholah, dan 3 buah gereja.

Table 2.48
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Menurut Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Tempat Ibadah					
		Masjid	Langgar	musholah	Gereja	Kuil	Vihara
1.	Dempo Selatan	35	-	-	-	-	-
2.	Dempo Tengah	25	-	8	-	-	-
3.	Dempo Utara	36	-	5	-	-	-
4.	Pagar Alam Selatan	49	2	4	2	-	-
5.	Pagar Alam Utara	41	6	3	1	-	-
Jumlah		186	8	20	3		-

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar tahun 2007

2.5 Pemerintahan

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no. 8 tahun 2001 tanggal 12 Juni 2001 Tambahan Lembaran Negara no. 4115, kota Pagar Alam mulai berdiri sendiri sebagai kota Madya dan terpisah dari Kabupaten Lahat . wilayah kota Pagar Alam meliputi 5 kecamatan yaitu : Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo utara, Dempo Selatan dan Dempo Tengah. Jumlah kelurahan di kota ini berjumlah 35, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2007 mencapai 122.440 jiwa.

Table 2.49
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Menurut Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah kelurahan
1.	Dempo Selatan	23.908	5
2.	Dempo Tengah	15.196	5
3.	Dempo Utara	12.398	7
4.	Pagar Alam Selatan	6.317	8
5.	Pagar Alam Utara	5.547	10

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar tahun 2007

Sebagai daerah yang baru terbentuk, system pemerintahan di kota Pagar Alam masih perlu banyak diperbaiki terutama masalah personil dan sarana. Hal ini terlihat dari kategori kelurahan yang ada, seluruhnya masih tergolong kelurahan swadaya.

Table 2.50
Jumlah Kelurahan Menurut Klasifikasi Kelurahan per Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	kecamatan	Jumlah Kelurahan			Jumlah
		Swadaya	Swakarsa	Swasembada	
1.	Dempo Selatan	5	-	-	5
2.	Dempo Tengah	5	-	-	5
3.	Dempo Utara	7	-	-	7
4.	Pagar Alam Selatan	8	-	-	8
5.	Pagar Alam Utara	10	-	-	10
Jumlah		35	-	-	35

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar tahun 200

Disamping itu, seluruh lembaga ketahanan masyarakat kelurahan (LKMK) yang ada di kelurahan termasuk dalam kategori III

Table 2.51
Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)
Menurut Kategori LKMK per Kecamatan
Di kota Pagar Alam tahun 2007

No	Kecamatan	Klasifikasi Kelurahan			Jumlah
		I	II	III	
1.	Dempo Selatan	-	-	5	5
2.	Dempo Tengah	-	-	5	5
3.	Dempo Utara	-	-	7	7
4.	Pagar Alam Selatan	-	-	8	8
5.	Pagar Alam Utara	-	-	10	10
Jumlah		-	-	35	35

Sumber : Pagar Alam dalam angka, BPS kota Pagar tahun 2007

Keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan juga cukup tinggi. Fhal ini bias dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu terakhir tahun 2004. Jumlah pemilih yang terdapat pada pemilu tersebut mencapai 78.277 orang.

Tabel 2.52
Jumlah Pemilu yang Terdaftar pada Pemilu Legislatif 2004 per kecamatan
Di Kota Pagar Alam

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dempo Selatan	3.925	3.852	7.777
2.	Dempo Tengah	4.078	4.131	8.209
3.	Dempo Utara	6.699	6.592	13.291
4.	Pagar Alam Selatan	13.276	12.974	26.250.
5.	Pagar Alam Utara	11.641	11.109	22.750
Jumlah		39.619	38.658	78.277

Sumber : Data Mata Pilih Pemilu Tahun 2004, Bagian Kesbang Linmas Setda KoTA Pagar Alam

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan warna baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Inti perubahan kebijakan dimaksud antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan daerah dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik meliputi : mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan , pengendalian dan pengawasn serta pertanggung jawaban keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, pengelolaan keuangan daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta dilakukan secara professional dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dengan prinsip :

1. Partisipasi masyarakat
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
3. Disiplin anggaran
4. Keadilan; dan
5. Efisiensi dan Efektivitas anggaran

3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta penerimaan daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pendapatan daerah dalam struktur APBK kota pagar Alam masih merupakan komponen yang sangat penting peranannya dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelayanan public.

Pengelolaan pendapatan daerah kota Pagar Alam tahun 2008 – 2013 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan lainnya guna lebi mengoptimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan PAD beberapa hal yang perlu dicermati antara lain :

1. Peningkatan PAD tidak boleh menghambat aktivitas perekonomian dengan munculnya berbagai macam regulasi sehingga menyebabkan *high cost* (ekonomi biaya tinggi).
2. Peningkatan PAD pada sector yang potensial untuk berkembang seperti pariwisata sebaiknya dihindari sebab adanya pungutan baik retribusi maupun pajak terhadap sektor dimaksud justru mengakibatkan terhambatnya pengembangan usaha yang pada gilirannya menyebabkan investasi menjadi berkurang, kesempatan kerja menurun dan pendapatan perkapita masyarakat juga menurun.

3. Peningkatan PAD hendaknya dihubungkan dengan peningkatan belanja pada sektor dimaksud agar meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Peningkatan PAD hendaknya diupayakan melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini untuk mengantisipasi pengurangan penerimaan PAD pasca migas.

Selain itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mencegah kebocoran dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah. Selanjutnya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk melakukan langkah-langkah *pro-jutiticia* bagi wajib pajak yang tidak mau mentaati kewajiban pada waktunya.

3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Arah pengelolaan belanja daerah kota Pagar Alam pada tahun 2008-2013 ditujukan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik berupa pengembangan sektor unggulan seperti perdagangan dan jasa dan pariwisata serta terjaminnya ketersediaan pelayanan dasar (air bersih, pendidikan dan kesehatan) dan pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur.

Anggaran pendidikan dalam 5 tahun ke depan ditetapkan tidak kurang dari 25 % berarti berada pada level diatas 20 % sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

Ditinjau dari struktur perekonomian kota Pagar Alam, sampai akhir tahun 2007 sektor pertanian memberikan kontribusi lebih dari 41 %. Sementara sector sekunder pada tahun yang sama, kontribusinya sebesar 13,07 %, yang terdiri dari bangunan (11,75), listrik, gas dan air bersih (0,18 %), serta industri pengolahan (1,14 %), peranan sector tersier cukup signifikan, dimana pada tahun 2007 kontribusinya mencapai 45,48 %. Ini berarti sector primer (pertanian) dan tersier merupakan sektor unggulan karena mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap barang dan jasa serta dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu investasi, program dan kegiatan harus diprioritaskan kepada sector ini.

Arah pengelolaan belanja yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Pagar Alam dengan meningkatnya Indeks pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka memperbesar proporsi belanja untuk pelayanan public, maka perlu efisiensi pada belanja aparatur. Alokasi belanja aparatur harus ditekan seminimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang lebih optimal. Di samping itu, perlu pengetatan dan disiplin anggaran serta mempertajam skala prioritas program yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat kota Pagar Alam yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja daerah ke depan dirancang sebagai berikut :

1. Proporsi belanja dinas-dinas yang terkait langsung dengan visi pemerintah daerah harus lebih besar disbanding dinas-dinas yang tidak terkait langsung.
2. Sebaiknya dinas-dinas yang tidak terkait dengan pencapaian visi pemerintah daerah dirasionalisasi.
3. Proporsi belanja perangkat daerah yang memiliki karakteristik staf seperti Sekretariat Daerah, DPRD, dan Lembaga Teknis Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat

harus lebih kecil dibanding dinas-dinas yang berhubungan dengan pencapaian visi pemerintah daerah.

3.3 Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama ini (*sebelum tahun 2008*) pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Murni :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah :
 - Bagi hasil perusahaan daerah
 - Jasa giro dan deposito daerah
2. Dana Perimbangan
3. Bagi Hasil dari Pusat :
 - a. Bagi hasil pajak
 - b. Bagi hasil bukan pajak
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - a. Bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah lainnya
 - b. Sumbangan pihak ketiga

Pengelolaan pendapatan daerah akan menekankan pada keserasian antara kebutuhan biaya dan pendapatan. Prinsip bahwa nilai tambah pendapatan daerah akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat merupakan upaya mobilitas sumber local melalui peningkatan pendapatan daerah sehingga tidak akan menimbulkan gangguan terhadap alokasi sumber daya, dengan konsekuensi adanya efisiensi biaya / belanja daerah.

Pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan baik pos bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.

Kebijakan umum anggaran pemerintah kota Pagar Alam khususnya komponen pendapatan daerah yaitu untuk menjamin kenaikan pendapatan daerah secara bertahap dan berkelanjutan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru, penyesuaian tariff pajak dan retribusi, peningkatan kesadaran wajib pajak, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengusahakan kenaikan dana perimbangan dan dana alokasi khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun pemerintah pusat melalui penyampaian data yang valid serta pendekatan secara pro-aktif.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Kondisi objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi pembangunan kota Pagar Alam dapat digambarkan melalui analisis SWOT, yaitu dengan melakukan identifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman), yang dirincikan sebagai berikut :

1. Pendidikan

a. Kekuatan

- Tersedianya lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi
- Adanya kemauan baik dari pemerintah kota Pagar Alam dan masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan di Kota Pagar Alam.
- Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan serta ruang belajar.
- Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan serta ruang belajar
- Adanya komitmen pemerintah yang mengalokasikan belanja pendidikan dalam APBD lebih dari 20 %
- Adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun yang dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah.

b. Kelemahan

- Masih banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah SD, dan hanya menamatkan jenjang pendidikan sampai dengan SD atau sederajat.
- Belum idealnya rasio sekolah terhadap siswa untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
- Belum meratanya distribusinya guru dan mutu pendidikan pada beberapa kecamatan.
- Rendahnya koordinasi antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha.

c. Peluang

- Penerapan otonomi daerah membuka kesempatan luas untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Adanya kerangka regulasi undang-undang tentang system pendidikan.
- Adanya partisipasi perguruan tinggi kota Pagar Alam dalam pembangunan daerah

d. Ancaman

Rendahnya penyerapan lulusan sekolah umum bagi dunia usaha.

2. Kesehatan

a. Kekuatan

- Tersedianya rumah sakit umum (RSUD, puskesmas dan balai pengobatan
- Tersedianya tenaga kesehatan
- Kebijakan program kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan seluruh lapisan masyarakat yang berkualitas.
- Adanya program Askeskin : berupa penyediaan dana kesehatan bagi masyarakat miskin.
- Sebagian besar pertolongan persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan.

b. Kelemahan

- Distribusi pelayanan kesehatan belum terselenggara secara merata.
- Rendahnya akses masyarakat bawah terhadap pelayanan kesehatan.
- Masih kurangnya dokter spesialis.
- Tingginya kasus penyakit menular.
- Distribusi sarana kesehatan tingkat dasar belum merata.
- Masih kurangnya kesadaran pada perilaku masyarakat terhadap budaya sehat dan bersih.

c. Peluang

Peningkatan jumlah puskesmas sampai dengan kecamatan dan puskesmas pembantu sampai tingkat kelurahan akan mampu mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

d. Ancaman

- Penyakit baru yang belum ditemukan penangkalnya (seperti flu burung, HIV/AIDS) serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
- Mahalnya obat-obat bermerek/paten akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat, terutama pada masyarakat miskin.
- Perubahan lingkungan (misalnya *global warming*) yang merugikan kesehatan masyarakat.

3. Kehidupan Beragama

a. Kekuatan

- Karakteristik masyarakat Pagar Alam yang religius.
- Kerukunan antar umat beragama
- Tersedianya sarana ibadah yang cukup memadai.

b. Kelemahan

- Pelaksanaan agama pada sebagian masyarakat masih bersifat simbolis, belum bersifat substantive.

- Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dikalangan anak didik kurang memuaskan.

c. Peluang

Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kerukunan beragama.

d. Ancaman

Arus globalisasi mempengaruhi anak didik daerah yang negatif.

4. Budaya dan Pariwisata

a. Kekuatan

- Secara umum budaya dan adapt Pagar Alam masih dihormati sebagai sebuah norma kehidupan bermasyarakat yang dapat dijadikan tuntunsn untuk menyelesaikan berbagai maslah baik yang menyangkut penduduk lokal maupun pendatang.
- Terdapat beberapa obyek pariwisata alam dan budaya yang masih asli dan potensial untuk dikembangkan.

b. Kelemahan

- Menurunnya apresiasi terutama di kalangan generasi muda terhadap budaya tradisional.
- Obyek pariwisata alam dan budaya yang ada belum dikelola secara baik, sehingga kontribusinya dalam pendapatan daerah masih rendah.
- Masih kurangnya promosi sumber daya pariwisata

c. Peluang

Pemanfaatan obyek pariwisata alam dan budaya akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan eksistensi wilayah yang bersangkutan.

d. Ancaman

- Semakin derasnya arus informasi dan akulturasi budaya asing melalui media masa
- Kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, baik obyek wisata daerah maupun daerah wisata yang nyaman dan aman akan menimbulkan menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung.

5. Ekonomi

a. Kekuatan

- Tersedianya potensi wilayah untuk pengembangan sektor agribisnis sebagai sektor unggulan
- Tersedia cukup banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan baku industri, yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tersedia beberapa industri rumah tangga.
- Adanya fasilitas transportasi dan komunikasi yang memadai yang mendukung penyaluran barang dan jasa.
- Tersedianya tenaga kerja yang memadai.
- Adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Adanya komitmen dan kebijakan pemerintah kota untuk mengembangkan kawasan industri di kota Pagar Alam.
- Potensi peningkatan PAD masih terbuka luas dengan memprioritaskan program pada kegiatan-kegiatan produktif dan mengurangi program-program konsumtif yang hanya menjadi beban anggaran daerah.
- Sumber daya pariwisata yang cukup memadai sebagai modal pemberdayaan masyarakat.

b. Kelemahan

- Kurangnya inovasi dalam pemasaran produk baik dari segi kemasan maupun keragaman produk.
- Belum berkembangnya industri pengolahan produk pertanian unggulan local.
- Minimnya akses permodalan bagi petani.
- Masih banyak sawah yang mengandalkan sistem tadah hujan.
- Peranan usaha kecil dan menengah, serta koperasi belum optimal dalam pertumbuhan ekonomi.
- Masih rendahnya skill pengrajin dan mutu produk yang dihasilkan dari industri kecil dan menengah.

- Belum optimalnya peran mediasi antara dinas dengan masyarakat serta industri dalam penerapan teknologi madya, pengembangan dan pemasaran produk.
 - Potensi sumber daya banyak yang belum digarap secara optimal, sehingga pendapatan asli daerah masih kecil.
- c. Peluang
- Kestabilan nilai tukar rupiah terhadap USD serta mata uang lainnya.
 - Dukungan pemerintah untuk pengentasan penduduk miskin, misalnya dengan program nasional PNPM.
 - Tersedianya teknologi madya pertanian.
 - Peningkatan daya tarik investasi dengan memberikan kemudahan dan insentif bagi investor yang bonafit dan serius, pada sektor-sektor memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
 - Pendirian industri hulu dan industri pengolahan untuk pemanfaatan sumber bahan baku yang cukup tersedia, sehingga nilai tambah diperoleh oleh daerah.
- d. Ancaman
- Fluktuasi harga produk pertanian akibat besarnya peranan pedagang besar.
 - Belum berfungsinya saluran tata niaga dengan baik dikarenakan belum berfungsinya lembaga pemasaran di tingkat pedesaan.
 - Masuknya produk dari luar daerah dan luar negeri, sehingga melemahkan daya saing dari produk lokal.
 - Penerapan pasar persaingan bebas, AFTA dan kerjasama-kerjasama intrnasional lainnya (seperti APEC).
 - Kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan terjadi dalam waktu lama.
 - Serangan hama dan penyakit terhadap komoditas yang diusahakan masyarakat baik untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ternak.
 - Bertambahnya beban keuangan pemerintah daerah akibat pelimpahan kewenangan dari pusat yang kurang diimbangi dengan penyerahan keuangan.

6. Politik

- a. Kekuatan
- Kondisi politik yang relative stabil.
 - Adanya kesadaran masyarakat secara luas untuk menggunakan hak-hak politiknya.
- b. Kelemahan
- Belum optimalnya komposisi struktur organisasi pemerintahan kota Pagar Alam yang didasari pada prinsip, miskin struktur kaya fungsi.
 - Masih dijumpai beberapa kewenangan yang tumpang tindih antar unit kerja.
 - Belum jelasnya mekanisme akuntabilitas implementasi kebijakan publik.
 - Pendidikan politik dan pengkaderan oleh partai politik belum efektif.
- c. Peluang
- Tingginya kepedulian dan peran masyarakat dalam berpolitik demokrasi.
 - Adanya undang-undang mengenai pemerintah daerah.

d. Ancaman

- Euforia reformasi yang berlebihan sehingga terkesan justru tidak sesuai dengan tujuan reformasi itu sendiri
- Tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik.
- Dalam penyelenggaraan komunikasi massa, komunikasi social dan kompetensi politik yang berorientasi pada proses demokrasi, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki profesionalisme dalam manajemen pemerintahan.

7. Hukum

a. Kekuatan

- Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di berbagai aspek kehidupan.
- Kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi dan telah tersedia perangkat hukum dan petugas penegak supermasi hukum.

b. Kelemahan

- Masih lemahnya penegakkan hukum.
- Perangkat hukum yang ada perlu ditambah, disertai dengan penyediaan sarana prasarana yang lebih layak.

c. Peluang

Semakin tingginya komitmen dalam pelaksanaan hukum di berbagai aspek kehidupan.

d. Ancaman

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hukum dan peraturan daerah.
- Masih adanya disharmoni antar tingkat pemerintahan berkaitannya dengan pengelolaan kewenangan pemerintahan.

8. Aparatur

a. Kekuatan

Terdapat banyak aparatur pemerintah dan dominant masih berusia muda, potensial untuk dididik dan dibimbing untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Kelemahan

- Belum optimalnya pelayanan aparatur kepada masyarakat.
- Aparatur belum bekerja secara professional.
- Tanggung jawab moral aparatur dalam pelayanan publik masih kurang.

c. Peluang

Kesiapan aparatur yang mampu meningkatkan pelayanan yang sederhana, murah dan cepat.

d. Ancaman

Kesiapan aparatur perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan pelayanan.

9. Keamanan dan Ketertiban Umum

a. Kekuatan

- Kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dan berperilaku sopan dan ramah.

- Aparat keamanan baik dari TNI maupun POLRI sudah tersebar hingga ke kecamatan.
- b. Kelemahan
- Masyarakat masih kurang disiplin terhadap peraturan yang berlaku.
 - Peningkatan daya jangkau aparat keamanan perlu ditingkatkan sehingga mampu untuk menangani berbagai kasus dan dapat mengantisipasi secara dini kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.
- c. Peluang
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Pagar Alam akan menunjang terhadap keamanan dan ketertiban.
- d. Ancaman
- Friksi dan konflik social akibat menurunnya daya beli masyarakat dan keseimbangan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan.

10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Kekuatan
- Sumber daya alam yang melimpah dari jumlah dan jenisnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Sumber daya air yang melimpah dan keanekaragaman hayati menjadi potensi pembangunan.
 - Secara umum lingkungan hidup masih terpelihara dengan baik.
- b. Kelemahan
- Pemahaman terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan masih rendah.
 - Perangkat umum lingkungan masih lemah.
 - Masih rendahnya perangkat teknologi untuk pendayagunaan sumber daya alam.
 - Penggunaan teknologi yang belum ramah lingkungan.
- c. Peluang
- Peningkatan/pengembangan sumber daya alam untuk pangan maupun industri.
 - Banyak lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang semakin peduli dengan lingkungan hidup, dan potensial untuk dikerjasamakan dengan Pagar Alam.
- d. Ancaman
- Dengan ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, maka sebagian besar kota Pagar Alam adalah daerah yang rawan longsor.
 - Aktivitas ekonomi di sektor industri dan jasa telah mendorong tingginya polusi terutama dari transportasi kendaraan bermotor.

11. Sarana dan Prasarana Wilayah

- a. Kekuatan
- Tersedia prasarana jalan, jembatan dan fasilitas transportasi untuk menjangkau daerah lain.
 - Sebagian besar penduduk menempati rumah yang layak huni dengan kondisi memenuhi syarat-syarat kesehatan.

- Tersedia jaringan listrik menjangkau kecamatan dan kelurahan .
- Terdapat saluran drainase yang dapat digunakan untuk membuang air pada musim pengujan.
- Terdapat sarana kebersihan kota, yaitu TPS, TPA, serta truk pengangkut sampah.
- Terdapat PDAM dengan kapasitas terpasang yang memadai, dan air tanah yang masih memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk digunakan tiap hari, bahkan untuk kegiatan industri.
- Terdapat sarana komunikasi seperti telepon rumah dan telepon genggam yang dapat menjangkau drmus kelurahan.

b. Kelemahan

- Belum adanya bandara lokal untuk mempermudah transportasi barang dan jasa dengan kabupaten dan provinsi lain.
- Belum meratanya ketersediaan fasilitas kebersihan di kecamatan-kecamatan di Pagar Alam.
- Cakupan penyediaan air bersih PDAM belum merata ke seluruh kecamatan dan kelurahan.
- Rendahnya pelayanan terhadap ketersediaan energi listrik dalam 24 jam.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penghematan pemakaian listrik, termasuk dalam menggunakan alat-alat rumah tangga yang hemat listrik.
- Jalur dan rumah satuan sambungan telepon rumah tangga masih terbatas, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

c. Peluang

- Tingginya kebutuhan listrik dan air bersih bagi rumah tangga dan dunia industri.
- Adanya konsumen dari pemerintah pusat untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik untuk wilayah Sumatera.
- Kebutuhan nasional akan kelancaran transportasi Jawa Sumatera sangat kuat.
- Adanya kebutuhan akan pembangunan Bandar udara di kota Pagar Alam .

d. Ancaman

- Melonjaknya harga BBM, mengakibatkan tingginya biaya produksi listrik yang menggunakan bahan baker minyak.
- Monopoli pengelolaan dan penyediaan listrik oleh PLN, sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.
- Tuntutan terhadap mutu pelayanan, mengingat masyarakat membutuhkan pelayanan secara memadai, tepat waktu dan berkualitas.

BAB V

VISI DAN MISI

5.1 Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang. Serta penggalian aspirasi masyarakat yang telah dilakukan, maka visi pemerintah kota Pagar Alam pada 2008-2013 adalah : ***“Pagar Alam sebagai Kota Agribisnis dan Pariwisata Bernuansa Islami”***

Visi diatas mengandung pengertian :

1. Kota agribisnis dan pariwisata, mengandung pengertian sebagai suatu kondisi dimasa yang akan datang dimana diharapkan kota Pagar Alam menjadi kota terdepan di sektor agribisnis dan pariwisata.
2. Bernuansa islami, dimaksudkan bahwa kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan dilandasi nilai-nilai agama islam.

5.2 Misi

Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi kota Pagar Alam dalam rangka pencapaian visi Pagar Alam 2013 ditetapkan dalam 6 misi.

Pertama : Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sekaligus memelihara serta mengembangkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis.

Tujuan :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat, dengan sasaran :
 - Meningkatkan angka lulusan pendidikan minimal sampai tingkat SLTA.
 - Meningkatkan kualitas lulusan SD sampai dengan SLTA.
 - Terwujudnya pendidikan gratis bagi masyarakat dari tingkat SD sampai dengan SLTA.
 - Berkurangnya angka putus sekolah.
 - Meningkatnya angka partisipasi sekolah.
 - Tersediannya rasio jumlah tenaga pengajar yang ideal.
 - Tersediannya sarana dan prasarana pendidikan yang ideal
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 - Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan.
 - Terimplementasinya pembangunan fisik dan non fisik berdimensi kesehatan dan ramah lingkungan.
 - Meningkatnya angka gizi buruk.
 - Menurunnya angka kematian bayi dan ibu hamil melahirkan.
 - Adanya dukungan dari berbagai organisasi dan berbagai sektor dalam pembangunan kesehatan di kota Pagar Alam.
 - Tersediannya rasio jumlah tenaga medis yang ideal dengan sebaran penduduk.
 - Tumbuhnya kesadaran akan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
 - Terdeteksinya secara dini penyakit menular dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya.

- Tersedianya pemerataan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan jumlah sebaran penduduk.
3. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran :
- Berkurangnya tingkat pengangguran.
 - Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
 - Meningkatnya jumlah KUKM.
 - Meningkatnya komposisi wiraswasta dibandingkan PNS.
4. Mewujudkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis, dengan sasaran :
- Meningkatnya komunikasi yang efektif antar umat beragama.
 - Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama.
 - Berkembangnya nilai budaya dan keaktifan lokal dalam kehidupan masyarakat yang disertai ketaatan terhadap ajaran agamanya.
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peribadatan.

Kedua : Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik sesuai dengan konsep *good governance*.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja pemerintahan, dengan sasaran :

- Terwujudnya aparatur yang professional.
- Terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan publik.
- Terwujudnya pelayanan yang responsive, akuntabel dan bertanggung jawab.
- Terwujudnya pelayanan publik yang dapat akses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.
- Rasionalisasi struktur birokrasi
- Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi.

Ketiga : Membangun dan meningkatkan sector perdagangan dan jasa.

Tujuan :

Mewujudkan pengembangan perdagangan dan jasa, dengan sasaran :

- Terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor perdagangan dan jasa.
- Masuknya modal/industri dari investor luar dan dalam daerah.
- Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB.
- Terciptanya kondisi infrastruktur yang layak dan memadai.
- Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan jasa
- Peningkatan dan dukungan regulasi mengenai investasi sector perdagangan dan jasa
- Tersediannya SDM yang berkualitas di sektor perdagangan dan jasa.

Keempat : Meningkatkan pembangunan sector agribisnis

Tujuan :

Mewujudkan pengembangan agribisnis, dengan sasaran :

- Terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor agribisnis.

- Masuknya modal/ industri dari investor luar dan dalam daerah.
- Meningkatnya kontribusi agribisnis terhadap PDRB.
- Terciptanya kondisi infrastruktur yang layak dan memadai.
- Peningkatan daya saing sektor agribisnis.
- Peningkatan dukungan regulasi, riset dan teknologi di sektor agribisnis.
- Tersediannya SDM yang berkualitas di sektor agribisnis.

Kelima : Meningkatnya pembangunan pariwisata

Tujuan :

Terwujudnya pengembangan pariwisata, dengan sasaran :

- Terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sector pariwisata.
- Masuknya modal/ industri dari investor luar dan dalam daerah.
- Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB.
- Terciptanya kondisi infrastruktur yang layak dan memadai.
- Peningkatan daya saing sektor pariwisata.
- Peningkatan dukungan regulasi, promosi pariwisata.
- Tersediannya SDM yang berkualitas di sektor pariwisata.

Keenam : Meningkatkan pembangunan sector infrastruktur

Tujuan :

1. Mewujudkan ssstem informasi yang mendukung mobilitas barang jasa, dengan sasaran :
 - Tersedianya infrastruktur dan fasilitas transportasi dalam kondisi baik.
2. Menyediakan sistem air bersih pemukimam yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan sasaran:
 - Tersediannya sistem air bersih yang mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat kota Pagar Alam
3. Menyediakan infrastruktur energi dan listrik, dengan sasaran :
 - Tersedianya pasokan listrik terhadap seluruh kelurahan.
 - Adanya energi alternatif terbarunya.
4. Menyediakan system irigasi yang mendukung sektor agribisnis, dengan sasaran :
 - Optimalnya fungsi jaringan irigasi.
5. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang, dengan sasaran :
 - Optimalnya penatan ruang perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
 - Terciptanya kota yang berwawasan lingkungan.

BAB VI

STRATEGI PEMBAGUNAN DAERAH

Adapun rumusan strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi Pembangunan daerah kota Pagar Alam untuk lima tahun kedepan (2008-2013) sebagai berikut :

Misi 1

Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sekaligus memelihara serta mengembangkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis dengan tujuan akhir yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat, maka *strategi* pembangunan yang diletakkan adalah :
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan pendidikan.
 - Menperluas dan melakukan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
 - Menambah jumlah dan kualitas tenaga kerja.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, maka *strategi* pembangunan yang diletakkan adalah :
 - Mengembangkan kemampuan kota untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.
 - Meningkatkan partisipasi kerjasama dengan organisasi profesi dan lintas sektoral.
 - Meningkatkan SDM dan tenaga professional di bidang kesehatan.
 - Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan.
 - Meningkatkan pemanfaatan data dari surveilan penyakit.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.
3. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka *strategi* yang diletakkan adalah :
 - Menciptakan lapangan kerja
 - Mengentaskan kemiskinan yang terarah dan terkoordinasi.
 - Memberdayakan koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM).
 - Meningkatkan jumlah KUKM.
 - Melakukan peningkatan kapasitas dalam hal kewirausahaan .
4. Mewujudkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis, maka *strategi* yang diletakkan adalah :
 - Mengembangkan kerukunan umat beragama.
 - Meningkatkan implementasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 2

Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik sesuai dengan konsep *good governance*, dengan tujuan akhir yaitu :

Meningkatkan kinerja pemerintahan, maka *strategi* pembangunan yang diletakkan adalah :

- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan.
- Mengefektifkan dan mengefisienkan birokrasi.
- Modernisasi manajemen pemerintahan.
- Menerapkan sistem pengawasan birokrasi yang sistematis.
- Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
- Merasionalisasikan struktur birokrasi.
- Mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Misi 3

Membangun dan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa dengan tujuan akhir yaitu :

Mewujudkan pengembangan perdagangan dan jasa, maka *strategi* pembangunan yang diletakkan adalah :

- Menciptakan iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor perdagangan dan jasa.
- Mengembangkan sektor perdagangan dan jasa.
- Mendorong terciptanya investasi padat karya di sektor perdagangan dan jasa.
- Membangun / memperbaiki infrastruktur penunjang.
- Menyusun kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha.
- Menyediakan SDM / tenaga kerja yang handal dan sesuai kebutuhan.

Misi 4

Membangun dan meningkatkan sektor agribisnis dengan tujuan akhir yaitu :

Mewujudkan pengembangan agribisnis, maka *strategi* pembangunan yang diletakkan adalah :

- Menciptakan iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor agribisnis.
- Mengembangkan sektor agribisnis.
- Mendorong terciptanya investasi padat karya di sektor agribisnis.
- Membangun / memperbaiki infrastruktur penunjang.
- Menyusun kebijakan yang ramah terhadap pengembangan agribisnis.
- Menyediakan SDM / tenaga kerja yang handal dan sesuai kebutuhan.

Misi 5

Membangun dan meningkatkan pembangunan sektor pariwisata, dengan tujuan akhir yaitu :

Mewujudkan pengembangan pariwisata, maka *strategi* pembangunan yang diletakkan adalah :

- Menciptakan iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor pariwisata.
- Mengembangkan sektor pariwisata.
- Mendorong terciptanya investasi padat karya di sektor pariwisata.
- Membangun / memperbaiki infrastruktur penunjang.
- Menyusun kebijakan yang ramah terhadap pengembangan pariwisata.
- Menyediakan SDM / tenaga kerja yang handal dan sesuai kebutuhan.

Misi 6

Meningkatkan pembangunan sector infrastruktur, dengan tujuan akhir yaitu :

1. Mewujudkan system transportasi yang mendukung mobilitas barang dan jasa, maka *strategi* pembangunan yang diletakakn adalah :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana transportasi / perhubungan.
2. Menyediakan system air pemukiman yang memenuhi kebutuhan masyarakat, maka *strategi* pembangunan yang diletakakn adalah :
 - Menyeduiakan air bersih dengan kuantitas dan kualitas yang baik.
3. Menyediakan infrastruktur energi dan listrik, maka *strategi* pembangunan yang diletakakan adalah :
 - Menyediakan pasokan listrik bagi kelurahan yang belum teraliri listrik.
 - Mengembangkan sumber energi alternatif
4. Menyediakan sistem irigasi yang mendukung sektor agribisnis, maka *strategi* pembangunan yang diletakakan adalah :
 - Mengembangkan system irigasi yang baik.
5. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang, maka *strategi* pembangunan yang diletakakan adalah :
 - Mengembangkan system pengelolaan rencana tata ruang.
6. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, maka *strategi* pembangunan yang diletakakan adalah :
 - Membangun kota yang berwawasan lingkungan.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi, dan isu-isu strategis yang telah ditentukan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri no. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negerinomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan umum pembangunan pemerintah Kota Pagar Alam untuk jangka menengah merupakan acuan bagi SKPD merumuskan program SKPD dan program lintas SKPD guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah dan mencermati gambaran umum daerah, maka pemerintah kota Pagar Alam mengambil arah kebijakan umumnya sebagai berikut :

Misi 1

Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sekaligus memelihara serta mengembangkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis, dengan tujuan akhir yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat, maka **kebijakan umumnya** adalah :

- Menerapkan kebijakan pendidikan murah dan berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat.
- Menganangkan wajib belajar dua belas tahun bagi kecamatan se Pagar Alam.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah.
- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar.
- Mengembangkan pendidikan non formaldengan target dapat m,enampung seluruh masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
- Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis agroindustri dan pariwisata.
- Meningkatkan kompetensi dan daya saingtenaga kerja di bidang agroindustri dan pariwisata.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh **program-program** pokok pembangunan yaitu:

- Program wajib belajar pendidikan dasar.
- Program pendidikan menengah.
- Program pendidikan non formal.
- Program pendidikan luar biasa.
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, maka **kebijakan umumnya** adalah :

- Mengembangkan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan.
- Memperluas jangkauan puskesmas melalui puskesmas keliling, puskesmas pembantu, jaringan puskesmas dan pos pengobatan pada daerah tertinggal dan daerah terpencil.
- Meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh **program-program** pokok pembangunan yaitu:

- Program manajemen pelayanan kesehatan.
- Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- Program sumber daya kesehatan.
- Program upaya kesehatan masyarakat.

3. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, maka **kebijakan umumnya** adalah :

- Meningkatkan kesempatan kerja.
- Meningkatkan keterrampilan / kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatkan keberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM).
- Meningkatkan keberdayaan fakir miskin.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh **program-program** pokok pembangunan yaitu:

- Program peningkatan kesempatan kerja.
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
 - Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha kecil dan menengah.
- Program pemberdayaan fakir miskin.

4. Mewujudkan suasana kehidupan keagamaan yang dinamis, maka **kebijakan umumnya** adalah :

- Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama.
- Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.
- Meningkatkan upayaimplementasi kesalehan social baik di kalangan aparat maupun seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh **program-program** pokok pembangunan yaitu:

- Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama.
- Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan.

Misi 2

Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik sesuai dengan konsep *good governance*, dengan tujuan akhir :

Meningkatkan kinerja pemerintahan, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Menciptakan struktur birokrasi yang professional.
- Menciptakan budaya birokrasi yang professional.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- Menata system peraturan perundang-undangan di daerah.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta mengembangkan system pengawasan dan akuntabilitas program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu:

- Program pemantapan otonomi daerah dan system administrasi daerah.
- Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Program penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum, dan HAM.
- Program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Program perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.

Misi 3

Membangun dan meningkatkan sektor perdagangan jasa, dengan tujuan akhir :

Mewujudkan pengembangan perdagangan dan jasa, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Mengembangkan kemitraan pemasaran produk unggulan.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program peningkatan dan pengembangan ekspor.
- Program pengembangan system perdagangan dalam negeri.
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Misi 4

Membangun dan meningkatkan sektor agribisnis, dengan tujuan akhir :

Mewujudkan pengembangan agribisnis, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.
- Meningkatkan kesejahteraan petani.
- Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program peningkatan produksi pertanian.
- Program pemberdayaan sumber daya pertanian.
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman dan ternak.
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.
- Program peningkatan kesejahteraan petani.
- Program peningkatan ketahanan pangan.

Misi 5

Membangun dan meningkatkan sektor pariwisata, dengan tujuan akhir :

Mewujudkan pengembangan pariwisata, maka *kebijakan umumnya* adalah :

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik, tradisional, dan mencerminkan jati diri masyarakat Pagar Alam.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program pengembangan pemasaran parawisata.
- Program pengembangan destinasi wisata.

Misi 6

Meningkatkan pembangunan sektor infrastruktur, dengan tujuan akhir :

1. Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung mobilitas barang dan jasa, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Meningkatkan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas barang dan jasa.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program pembangun jalan dan jembatan.
 - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
 - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
 - Program peningkatan pelayanan angkutan.
 - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
2. Menyediakan sistem air bersih pemukiman yang memenuhi kebutuhan masyarakat, maka *kebijakan umumnya* adalah :
- Mengelola pendayagunaan sumber daya air.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program pengembangan dan pengelolaan air bersih dan air limbah.

3. Menyediakan infrastruktur energi dan listrik, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Menjaga ketersediaan listrik dan energi melalui pengembangan energi terbarukan.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi.

4. Menyediakan sistem irigasi yang mendukung sektor agribisnis, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Memantapkan infrastruktur jaringan irigasi guna mendukung sektor agribisnis.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

5. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Penyelenggaraan penataan ruang secara serasi dan konsisten serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian.
- Mewujudkan struktur ruang yang mampu meningkatkan keterkaitan desa dan kota dalam menunjang kegiatan ekonomi di daerah pedesaan.
- Memperbaiki rasio kesesuaian peruntukan dan pemanfaatan kawasan lindung.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program perencanaan ruang
- Program pemanfaatan ruang.
- Program pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, maka *kebijakan umumnya* adalah :

- Meningkatkan kualitas udara perkotaan.
- Mendorong penggunaan bahan energi dan teknologi ramah lingkungan.
- Meningkatkan koordinasi penanganan persampahan dan limbah.
- Menangani lahan kritis, lahan kosong, dan lahan terlantar di kawasan lindung.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, didukung oleh *program-program* pokok pembangunan, yaitu :

- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Program pengelolaan kawasan lindung.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan kota Pagar Alam ini disusun dengan memperhatikan rancangan renstra yang disiapkan oleh masing-masing SKPD yang diintegrasikan dengan visi, misi kebijakan dan program dan program yang tertuang dalam RPJM kota Pagar Alam tahun 2008 – 2013.

8.1 Program Lintas SKPD

8.1.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

- 8.1.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat
- 8.1.1.2. Upaya kesehatan masyarakat
- 8.1.1.3. Upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba

8.1.2. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran

- 8.1.2.1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKAS)lainnya
- 8.1.2.2. Peningkatan kesempatan kerja
- 8.1.2.3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 8.1.2.4. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif

8.1.3. Meningkatkan kinerja pemerintahan

- 8.1.3.1. Perencanaan pembangunan daerah
- 8.1.3.2. Pembinaan dan pengembangan aparatur
- 8.1.3.3. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.1.3.4. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.1.3.5. peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.1.3.6. pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- 8.1.3.7. pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- 8.1.3.8. peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.1.3.9. penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM
- 8.1.3.10. Kemitraan pengembang wawasan kebangsaan
- 8.1.3.11. pemberdayaan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan
- 8.1.3.12. peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
- 8.1.3.13. Pendidikan politik masyarakat
- 8.1.3.14. pengelolaan keragaman budaya

8.1.4. Mewujudkan pengembangan agribisnis

- 8.1.4.1. Peningkatan kesejahteraan petani
- 8.1.4.2. Peningkatan produksi pertanian
- 8.1.4.3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman dan ternak
- 8.1.4.4. Peningkatan ketahanan pangan

8.1.5. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang

8.1.5.1. Perencanaan penataan ruang

8.1.5.2. Pengendalian dan pemanfaatan ruang

8.1.6. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan

8.1.6.1. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan

8.1.6.2. Rehabilitasi dan konservasi SDA dan lingkungan hidup

8.1.6.3. Pengelolaan kawasan lindung

8.2. Program SKPD

8.2.1. Sekretariat Daerah

8.2.1.1. Perencanaan pembangunan daerah

8.2.1.2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

8.2.1.3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KHD

8.2.1.4. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

8.2.1.5. Pembangunan system pendaftaran tanah

8.2.1.6. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

8.2.1.7. penyelesaian konflik-konflik pertanahan

8.2.1.8. Pembangunan system informasi pertanahan

8.2.1.9. Kerjasama informasi dengan mass media

8.2.1.10. Penataan peraturan perundang-undangan

8.2.1.11. Pengembangan dan keserasian kebijakan penduduk

8.2.1.12. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

8.2.1.13. Pembinaan dan dan pemsyarakatan olahraga

8.2.1.14. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

8.2.1.15. Pemberdayaan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan

8.2.1.16. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

8.2.1.17. Pendidikan politik masyarakat

8.2.1.18. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

8.2.1.19. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8.2.1.20. Pembinaan dan fasitasi pengelolaan keuangan kota

8.2.1.21. Pengembangan data / informasi

8.2.1.22. Pendidikan non formal

8.2.1.23. Pemberdayaan komunitas perumahan

8.2.1.24. Peningkatan kesempatan kerja

8.2.1.25. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

8.2.1.26. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif

8.2.1.27. Pengelolaan keragaman budaya

8.2.1.28. Pelayanan administrasi perkantoran

8.2.1.29. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8.2.1.30. Peningkatan disiplin aparatur

- 8.2.1.31. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.1.32. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.1.33. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 8.2.2.1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- 8.2.2.2. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.2.4. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.2.5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.2.6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.2.7. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- 8.2.3.1. Pendidikan anak usia dini
- 8.2.3.2. Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
- 8.2.3.3. Pendidikan menengah
- 8.2.3.4. Pendidikan non formal
- 8.2.3.5. Pendidikan luar biasa
- 8.2.3.6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik
- 8.2.3.7. Manajemen pelayanan pendidikan
- 8.2.3.8. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- 8.2.3.9. Peningkatan peran serta kepemudaan
- 8.2.3.10. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- 8.2.3.11. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 8.2.3.12. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
- 8.2.3.13. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 8.2.3.14. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- 8.2.3.15. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.3.16. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.3.17. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.3.18. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.3.19. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.3.20. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.4. Dinas Kesehatan

- 8.2.4.1. Obat dan perbekalan kesehatan
- 8.2.4.2. Pengawasan obat dan makanan
- 8.2.4.3. Pengembangan obat asli Indonesia
- 8.2.4.4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 8.2.4.5. Perbaikan gizi masyarakat
- 8.2.4.6. Pengembangan lingkungan sehat

- 8.2.4.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 8.2.4.8. Standardisasi pelayanan kesehatan
- 8.2.4.9. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
- 8.2.4.10. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / pustu dan jaringannya.
- 8.2.4.11. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 8.2.4.12. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- 8.2.4.13. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- 8.2.4.14. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 8.2.4.15. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.4.16. Pelayanan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.4.17. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.4.18. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.4.19. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.4.20. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.5. Dinas Pekerjaan Umum

- 8.2.5.1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 8.2.5.2. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- 8.2.5.3. Penyediaan dan pengelolaan air baku
- 8.2.5.4. Pengendalian banjir
- 8.2.5.5. Pembangunan jalan dan jembatan
- 8.2.5.6. Pembangunan turap / talud dan bronjong
- 8.2.5.7. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- 8.2.5.8. Tanggap darurat jalan dan jembatan
- 8.2.5.9. Pembangunan system informasi / database
- 8.2.5.10. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- 8.2.5.11. Lingkungan sehat perumahan
- 8.2.5.12. Pengembangan infrastruktur pedesaan
- 8.2.5.13. Pengembangan perumahan
- 8.2.5.14. Perencanaan dan pengembangan daerah strategis dan cepat tumbuh
- 8.2.5.15. Perencanaan dan pengembangan wilayah perbatasan
- 8.2.5.16. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- 8.2.5.17. Perencanaan tata ruang
- 8.2.5.18. Pemanfaatan ruang
- 8.2.5.19. Pengendalian pemanfaatan ruang
- 8.2.5.20. Pemberdayaan komunitas perumahan
- 8.2.5.21. Perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
- 8.2.5.22. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.5.23. Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
- 8.2.5.24. Peningkatan disiplin aparatur

- 8.2.5.25. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.5.26. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.5.27. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.6 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

- 8.2.6.1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adapt terencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- 8.2.6.2. Pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial
- 8.2.6.3. Pembinaan anak terlantar
- 8.2.6.4. Pembinaan para penyandangcacat dan trauma
- 8.2.6.5. Pembinaan panti asuhan / panti jompo
- 8.2.6.6 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya
- 8.2.6.7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 8.2.6.8. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 8.2.6.9. Peningkatan kesempatan kerja
- 8.2.6.10. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 8.2.6.11. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.6.12. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.6.13. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.6.14. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.6.15. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.6.16. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 8.2.7.1.Peningkatan administrasi kependudukan
- 8.2.7.2.Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.7.3.Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
- 8.2.7.4.Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.7.5.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.7.6.Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.7.7.Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 8.2.8.1.Peningkatan kesejahteraan petani
- 8.2.8.2.Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
- 8.2.8.3.Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan
- 8.2.8.4.Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
- 8.2.8.5.Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.8.6.Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.8.7.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.8.8.Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.8.9.Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.9. Dinas Peternakan dan Perikanan

- 8.2.9.1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 8.2.9.2. Peningkatan produksi hasil peternakan
- 8.2.9.3. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- 8.2.9.4. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
- 8.2.9.5. Pengembangan budidaya perikanan
- 8.2.9.6. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 8.2.9.7. Pengembangan kawasan budidaya air tawar
- 8.2.9.8. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.9.9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.9.10. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.9.11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.9.12. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.9.13. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- 8.2.10.1. Pengendalian kebakaran hutan
- 8.2.10.2. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- 8.2.10.3. Rehabilitas hutan dan lahan
- 8.2.10.4. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- 8.2.10.5. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- 8.2.10.6. Perencanaan dan pengembangan hutan
- 8.2.10.7. Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan
- 8.2.10.8. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan
- 8.2.10.9. Peningkatan penerapan teknologi perkebunan
- 8.2.10.10. Peningkatan produksi perkebunan
- 8.2.10.11. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.10.12. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.10.13. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.10.14. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.10.15. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.10.16. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.11. Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar

- 8.2.11.1. Peningkatan kapasitas Iptek system produksi
- 8.2.11.2. Pengembangan industri kecil dan menengah
- 8.2.11.3. Peningkatan kemampuan teknologi industri
- 8.2.11.4. Penataan struktur industri
- 8.2.11.5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- 8.2.11.6. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 8.2.11.7. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional

- 8.2.11.8. Peningkatan Pengembangan ekspor
- 8.2.11.9. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 8.2.11.10. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- 8.2.11.11. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- 8.2.11.12. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
- 8.2.11.13. Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM
- 8.2.11.14. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 8.2.11.15. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- 8.2.11.16. Peningkatan iklim investasi dan realisasi usaha
- 8.2.11.17. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.11.18. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.11.19. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.11.20. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.11.21. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.11.22. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.12. Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informasi

- 8.2.12.1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 8.2.12.2. Rehabilitas dan pemeliharaan prasaran dan fasilitas LLAJ
- 8.2.12.3. Peningkatan pelayanan angkutan
- 8.2.12.4. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- 8.2.12.5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- 8.2.12.6. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- 8.2.12.7. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
- 8.2.12.8. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- 8.2.12.9. Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- 8.2.12.10. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.12.11. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.12.12. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.12.13. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.12.14. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.12.15. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- 8.2.13.1 Pengembangan nilai budaya
- 8.2.13.2 Pengelolaan kekayaan budaya
- 8.2.13.3 Pengelolaan keragaman budaya
- 8.2.13.4 Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- 8.2.13.5 Pemasaran pariwisata
- 8.2.13.6 Pengembangan destinasi pariwisata
- 8.2.13.7 Pengembangan kemitraan
- 8.2.13.8 Pelayanan administrasi perkantoran

- 8.2.13.9 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.13.10 Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.13.11 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.13.12 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.13.13 Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

- 8.2.14.1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 8.2.14.2. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.14.3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.14.4. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.14.5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.14.6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.14.7. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 8.2.15.1. Pengembangan data / informasi
- 8.2.15.2. Kerjasama pembangunan
- 8.2.15.3. Pengembangan wilayah perbatasan
- 8.2.15.4. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 8.2.15.5. Peningkatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- 8.2.15.6. Perencanaan pembangunan daerah
- 8.2.15.7. Perencanaan pembangunan ekonomi
- 8.2.15.8. Perencanaan social budaya
- 8.2.15.9. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA
- 8.2.15.10. Perencanaan daerah rawan bencana
- 8.2.15.11. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
- 8.2.15.12. Pengembangan data / informasi/ statistik daerah
- 8.2.15.13. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.15.14. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.15.15. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.15.16. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.15.17. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.15.18. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.16. Badan Kepegawaian Daerah

- 8.2.16.1. Pendidikan kedinasan
- 8.2.16.2. Pembinaan dan pengembangan aparatur
- 8.2.16.3. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.16.4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.16.5. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.16.6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 8.2.16.7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.16.8. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.17. Inspektorat

- 8.12.17.1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 8.12.17.2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 8.12.17.3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 8.12.17.4. Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat
- 8.12.17.5. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.12.17.6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.12.17.7. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.12.17.8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.12.17.9. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.12.17.10. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.18. Badan Ketahanan Pangan, Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- 8.2.18.1. Peningkatan ketahanan pangan
- 8.2.18.2. Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan / peternakan lapangan
- 8.2.18.3. Pengembangan system penyuluhan perikanan
- 8.2.18.4. Perlindungan dan konservasi hutan
- 8.2.18.5. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.18.6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.18.7. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.18.8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.18.9. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.18.10. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.19. Badan Kesbang, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah

- 8.2.19.1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 8.2.19.2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 8.2.19.3. Pengembangan wawasan kebangsaan
- 8.2.19.4. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- 8.2.19.5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- 8.2.19.6. Pendidikan politik masyarakat
- 8.2.19.7. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 8.2.19.8. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.19.9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.19.10. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.19.11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.19.12. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.2.19.13. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.20. Badan KB, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan

8.2.20.1. Keluarga Berencana

8.2.20.2. Kesehatan reproduksi remaja

8.2.20.3. Pelayanan kontrasepsi

8.2.20.4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri

8.2.20.5. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

8.2.20.6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

8.2.20.7. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS

8.2.20.8. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

8.2.20.9. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

8.2.20.10. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

8.2.20.11. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

8.2.20.12. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

8.2.20.13. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

8.2.20.14. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

8.2.20.15. Pelayanan administrasi perkantoran

8.2.20.16. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8.2.20.17. Peningkatan disiplin aparatur

8.2.20.18. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

8.2.20.19. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.2.20.20. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.21. Kantor Pemberdayaan Masyarakat

8.2.21.1 Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan

8.2.21.2 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

8.2.21.3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

8.2.21.4 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

8.2.21.5 Peningkatan peran perempuan di pedesaan

8.2.21.6 Pelayanan administrasi perkantoran

8.2.21.7 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

8.2.21.8 Peningkatan disiplin aparatur

8.2.21.9 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

8.2.21.10 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.2.21.11 Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.22. Kantor Perpustakaan Umum Daerah, Arsip Daerah, Dokumentasi dan LPP

8.2.22.1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

8.2.22.2. Perbaikan sistem administrasi kearsipan

8.2.22.3. Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah

8.2.22.4. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

- 8.2.22.5. Peningkatan kualitas pelayanan informasi
- 8.2.22.6. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- 8.2.22.7. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.22.8. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.22.9. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.22.10. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.22.11. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.22.12. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.23. Kantor Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman

- 8.2.23.1. Pengolaan areal pemakaman
- 8.2.23.2. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- 8.2.23.3. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 8.2.23.4. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.23.5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.23.6. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.23.7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.23.8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.23.9. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.24. Kantor Pengolaan Lingkungan Hidup

- 8.2.24.1. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- 8.2.24.2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 8.2.24.3. Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
- 8.2.24.4. Peningkatan pengendalian polusi
- 8.2.24.5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan
- 8.2.24.6. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.24.7. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.24.8. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.24.9. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.24.10. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.24.11. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.25. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- 8.2.25.1. Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 8.2.25.2. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.25.3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.25.4. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.25.5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.25.6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.25.7. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.26. Rumah Sakita Daerah

- 8.2.26.1. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- 8.2.26.2. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
- 8.2.26.3. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.26.4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.26.5. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.26.6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.26.7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.26.8. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

8.2.27. Kecamatan

- 8.2.27.1. Pelayanan administrasi perkantoran
- 8.2.27.2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 8.2.27.3. Peningkatan disiplin aparatur
- 8.2.27.4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 8.2.27.5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 8.2.27.6. Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD

BAB IX
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Keberhasilan pembangunan di daerah dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit (gabungan) yang mempunyai keterkaitan dengan beberapa variable. Indikator ini dapat bermanfaat penggunaannya dengan baik apabila dilakukan perbandingannya antar waktu dan antar wilayah, sehingga posisi relatif suatu wilayah terhadap suatu wilayah yang lain dapat diketahui serta kemajuan dan perbandingannya dengan pencapaian dengan wilayah lainjuga dapat dibahas. Secara umum diindikator tersebut bermanfaat sebagai alat advokasi terhadap perumus dan penentu kebijakan di setiap wilayah, khususnya berkaitan dengan kebijakan publik yang dipilih dan ditetapkan.

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran utama dalam perhitungan IPM adalah :

- a. IPM disusun oleh indeks derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli.
- b. Indeks derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli dipengaruhi oleh konsumsi perkapita masyarakat, belanja pembangunan dan rutin pemerintah perkapita. Belanja perkapita dikelompokkan menjadi belanja untuk pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi).
- c. Masing-masing belanja perkapita dipengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk.
- d. Laju pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan investasi dan ekspor neto.

Melihat kondisi kota Pagar Alam dibandingkan kota lain dalam provinsi Sumatera Selatan, maka titik perhatian lebih diarahkan pada peningkatan indikator-indikator yang diproyeksikan, sebagaimana yang terdapat pada table 9.1 :

Table 9.1
Proyeksi Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Pagar Alam pada tahun 2013

Indikator	Tahun	Perkiraan Pencapaian Tahun					
		1008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Nilai IPM/HDI	71,5	72,1	72,6	73,2	74,5	75,2	77,3
2. Usia harapan hidup (tahun)	74,0	74,3	74,7	75,0	77,5	78,3	800
3. Merek huruf usia dewasa	97,8	98,0	98,3	98,5	98,8	99,0	99,8
4. Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	12,0
5. Rata-rata pengeluaran belanja Perkapita (x Rp. 1000,-)	558,1	558,8	559,5	560,2	560,9	561,6	572,4

Untuk pencapaian indeks pembangunan manusia seperti yang diproyeksikan di atas maka perlu diperhatikan pencapaian indikator masing-masing dan dilakukan penyesuaian strategi jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada rencana pencapaian indeks kesehatan (usia harapan baru) diperlukan beberapa indicator outcome. Penyebab langsung terhadap tingkat kesehatan ditunjukkan dengan rencana cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Penyebab tidak langsung yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan rasio puskesmas dan tenaga medis. Kondisi lingkungan kesehatan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian sebagai sebab mendasar adalah cakupan air bersih, penggunaan tangki septic tank dan lain-lain.

Untuk mencapai angka indeks pendidikan sebagaimana yang diproyeksikan, perlu diperhatikan peningkatan angka partisipasi pendidikan sekolah baik SD, SLTP maupun SLTA. Sebab tak langsung yang perlu diperhatikan adalah perlu perlunya peningkatan rasio guru murid serta rasio ruang dan murid.

Pada indeks daya beli, penyebab langsung yang perlu mendapat perhatian adalah upaya peningkatan sarana tenaga kerja pada berbagai sektor yang dominan. Sementara penyebab baik tidak langsung sebaiknya langsung sebaiknya lebih difokuskan pada pembentukan investasi dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Selain sebab langsung dan tidak langsung sebagaimana disebutkan di atas, beberapa masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan ketiga komponen dalam IPM adalah angka kemiskinan atau penurunan penduduk miskin.

BAB X

PENUTUP

10.1. Program Transisi

Penyusunan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2005 tentang petunjuk Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dalam penyusunan program ditambahkan rancangan program indikatif 1(satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD Kota Pagar Alam berakhir. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada masa akhir jabatan Kepala Daerah maka dapat dimuat rancangan program indikatif tahun 2013 bila diperlukan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

- 1. RPMJD Kota Pagar Alam ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk tahun 2008-2013.**

Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Pagar Alam dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Pagar Alam.

- 2. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD**

SKPD Kota Pagar Alam dalam menyusun Renstra SKPD diharuskan untuk berpedoman kepada RPJMD Kota Pagar Alam. Hal tersebut agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2013 tersebut dapat dicapai dengan maksimal.

- 3. RPJMD Kota Pagar Ala mini akan digunakan dalam penyusunan RKPD**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam, penyusunannya diharuskan berpedoman kepada RPJMD Kota Pagar Alam, sehingga RKPD Kota Pagar Alam tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Pagar Alam dalam kurun waktu tahunan.